

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PENGEMBANGAN USAHA
AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Pada Petani Padi Sawah Gapoktan Bumi Kencono Desa Sritejo Kencono
Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)**

Oleh :

**LIA ARIYANTI
NPM : 1451010068**

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440H / 2018 M**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA PENGEMBANGAN USAHA
AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**(Studi Pada Petani Padi Sawah Gapoktan Bumi Kencono Desa Sritejo Kencono
Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)

Oleh :

**LIA ARIYANTI
NPM : 1451010068**

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

**Pembimbing I : Drs. M. Nasruddin, M.Ag.
Pembimbing II : A. Zuliansyah, S.Si., MM.**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440H / 2018 M**

ABSTRAK

Pengembangan Usaha agribisnis Perdesaaan (PUAP) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi petani, dengan memberikan bantuan modal dalam bentuk pinjaman di bidang pertanian. Pinjaman ini di salurkan melalui Gapoktan sebagai pengelola PUAP kepada petani. Dalam proses penyaluran tidak selalu berjalan lancar, banyak terdapat kendala terutama pada saat proses pengembalian pinjaman. Banyak dari petani yang terlambat dalam mengembalikan pinjaman sehingga menghambat proses penyaluran. Salah satunya adalah macetnya usaha yang dilakukan oleh petani nasabah PUAP dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah yang akan menimbulkan permasalahan yang serius dan harus cepat diatasi.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : bagaimana faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah usaha pada nasabah peminjam dana PUAP Gapoktan Bumi Kencono?, dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pembiayaan bermasalah dana PUAP?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada PUAP Gapoktan Bumi Kencono dan untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap pembiayaan bermasalah dana PUAP Gapoktan Bumi Kencono.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reserch*) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini penulis melakukan Penelitian di Gapoktan Bumi Kencono, Desa Sritejokencono, Kecamatan Kotagajah, Lampung Tengah. Objek dalam penelitian ini adalah pengurus Gapoktan Bumi Kencono dan petani nasabah PUAP. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah peminjam dana PUAP. Populasi berjumlah 700 petani dan sampel 88 petani. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang didapatkan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Analisa data menggunakan kualitatif dan menggunakan metode penulisan deskriptif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah Petani nasabah PUAP di Gapoktan Bumi Kencono adalah Faktor internal berupa Tidak adanya penilaian dan jaminan terhadap petani penerima dana PUAP. Faktor eksternal berupa rasa tanggung jawab yang kurang dari petani, serta gagal panen. Dalam tinjauan ekonomi Islam pelaksanaan PUAP di Gapoktan Bumi Kencono telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu keadilan. Hanya saja dalam proses pengembalian banyak petani yang tidak sesuai dengan pertanjan seharusnya seseorang yang meminjam harus menepati perjanjian, apabila si peminjam ingkar janji dan tidak menepati janjinya maka ia telah berkhianat, dan seseorang yang dengan sengaja tidak membayar kewajibannya sedangkan dia mampu maka dia adalah dzolim.

kata kunci : *PUAP, Pembiayaan Bermasalah.*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. H. Endro Suratmin, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Sukarame, Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Petani Sawah Gapoktan Bumi Kencono Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama Mahasiswa : **Lia Ariyanti**

NPM : **1451010068**

Jurusan : **Ekonomi Syariah**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Nasruddin, M.Ag.
NIP. 195809241990031003

A. Zuliansyah, S.Si., MM.
NIP. 198302222009121003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Madnasir, S.E., M.S.I

NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul **"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Petani Padi Sawah Gapoktan Bumi Kencono Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)"**, disusun oleh **Lia Ariyanti, NPM. : 1451010068**, Jurusan Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal : **Senin, 03**

Desember 2018.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang : **Budimansyah, M.Kom.I**

Sekretaris : **Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy**

Penguji 1 : **Deky Fermansyah, S.E., M.Si**

Penguji 2 : **Drs. Nasruddin, M.Ag**

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Moh. Bahrudin, M.A
NIP.19580824 198903 1 003

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*. (QS. Al-Baqarah (2) : 280)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2004), h. 37.

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkatrahmat, karunis dan hidayah-Nya, sebagai bukti dan hormat serta kasih sayang saya persembahkan karya tulis ini untuk :

1. Kedua orang tua saya Bapak Slamet dan Ibu Sutini tercinta yang telah menjadi motivator terbesar dalam hidup saya. Do'a yang tulus yang tak hentinya dipanjatkan untuk saya. Terima kasih atas kasih sayang, jasa, pengorbanan, mendidik dan membesarkan saya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung dengan gelar Sarjana.
2. Kakak-kakaku , Eka Suryani dan Desi Septiani yang saya sayangi, yang selalu memberikan semangat, dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dan dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung.
3. Para sahabat Ilham Arif Ihsani, Amallia Sundari, Ike Widya Sari, Nur Azizah Al-Alawiyah, Sarah Septalianti, Rianty Ningsih dan Tria Wulandari yang telah membantu, menemani dan memberi dukungan dan semangat tanpa henti sampai skripsi ini selesai.

4. Kepada teman-teman seperjuanganku Ekonomi Syariah kelas B, Aci Harningsih, Suty Lestari dan teman-teman angkatan tahun 2014 yang telah memberikan dukungan semangat dan motivasi dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan.
5. Teman-teman KKN 259 Sukoyoso Pringsewu, Ervina Damayanti, Novia Cahyati dan teman-teman yang lainnya yang telah memberi semangat dan dukungan kepada saya.
6. Alamamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama Lia Ariyanti lahir di Sritejokencono pada 08 Januari 1997. Penulis merupakan putri ketiga dari pasangan Bapak Slamet dengan Ibu Sutini. Jenjang pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. SD Negeri 4 Sritejokencono, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah di selesaikan pada tahun 2008.
2. SMP Negeri 1 Sritejokencono Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah di selesaikan pada tahun 2011.
3. SMA Negeri 1 Kotagajah Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah di selesaikan pada tahun 2014.
4. Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Atas kehendak Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Padi Sawah Gapoktan Bumi Kencono Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE), Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. Moh. Bahrudin, M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.

2. Madnasir, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswanya.
3. Drs. H. M. Nasrudin, M.Ag. selaku Pembimbing satu yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini selesai.
4. Bapak A. Zuliansyah, S.Si., MM. selaku pembimbing dua yang membantu meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Ibu Dosen dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
6. Pengurus Gapoktan Bumi Kencono dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian dan tulisan ini masih jauh dari sempurna. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pembaca khususnya di Jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2018

Lia Ariyanti

1451010068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan judul	1
B. Alasan memilih judul	2
C. Latar belakang masalah	3
D. Rumusan masalah	12
E. Tujuan dan manfaat penelitian	12
F. Deskripsi teori	13
G. Metodologi penelitian	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan	21
1. Pengertian pembiayaan	21
2. Tujuan pembiayaan	22
3. Jenis-jenis pembiayaan	24
B. Pembiayaan bermasalah	32
1. Pengertian pembiayaan bermasalah	32
2. Penetapan kualitas pembiayaan	33
3. Sebab-sebab pembiayaan bermasalah	35
4. Penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah	37
C. Etika utang piutang	39
D. Kewajiban membayar hutang	42
E. Pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP)	43
1. Tujuan puap	43
2. Sasaran puap	44
3. Pola dasar dan strategi pelaksanaan puap	44
4. Indikator keberhasilan	47
5. Seleksi kriteria desa dan Gapoktan penerima PUAP	48
6. Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB)	49

	7. Organisasi pelaksana PUAP	51
	8. Pembinaan dan Pengendalian	54
	F. Agribisnis	57
	1. Pengertian agribisnis	57
	2. Ruang lingkup agribisnis	58
	G. Penelitian terdahulu	61
BAB III	PENYAJIAN DATA PENELITIAN	
	A. Gambaran umum lokasi penelitian	65
	1. Sejarah singkat berdirinya desa Sritejo Kencono	65
	2. Keadaan sosial ekonomi penduduk	66
	3. Gambaran umum Gapoktan Bumi Kencono	67
	B. Karakteristik responden	69
	C. Kondisi usaha petani yang mendapatkan fasilitas Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	71
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Gapoktan Bumi Kencono, Desa Sritejo Kencono	78
	B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap pembiayaan bermasalah dana PUAP di Gapoktan Bumi Kencono, Desa Sritejo Kencono	83
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	88
	B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2010-2014	5
Tabel 1.2	Produksi Padi Sawah Berdasarkan Provinsi di Indonesia tahun 2011-2015.....	6
Tabel 1.3	Produksi tanaman padi sawah menurut kabupaten/kota tahun 2010/2015	6
Tabel 1.4	Laporan Perkembangan Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	11
Tabel 3.1	Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Usia Di Desa Sritejokencono	67
Tabel 3.2	Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin	70
Tabel 3.3	Karakteristik responden berdasarkan luas area lahan	70
Tabel 3.4	Jawab responden tentang usaha yang dilakukan sebelum mendapat dana PUAP	72
Tabel 3.5	Jawaban responden tentang alasan memperoleh fasilitas kredit dari PUAP	73
Tabel 3.6	Jawaban responden tentang waktu pencairan dana PUAP	74
Tabel 3.7	Jawaban responden tentang hasil usaha yang dijalankan setelah mendapatkan pinjaman PUAP	75
Tabel 3.8	Jawaban responden tentang keuntungan yang diperoleh setelah mendapat pinjaman PUAP	76
Tabel 3.9	Jawaban responden tentang pengawasan dari pihak pengelola PUAP setelah mendapat pinjaman modal	77
Tabel 4.1	Jawaban responden tentang kendala dalam memebayar pinjaman yang sudah jatuh tempo.....	83

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Gapoktan Bumi Kencono.....	68
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Berita Acara Seminar Proposal
- Lampiran 2 Berita Acara Munaqosyah
- Lampiran 3 Surat Pernyataan Tidak Plagiat
- Lampiran 4 Surat Izin Riset Penelitian
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 Pedoman Program PUAP
- Lampiran 7 Blangko Konsultasi
- Lampiran 8 Bukti Pengambilan data

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahfahaman atau kekaburan dalam mengambil arti dan maksud istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, maka diperlukan beberapa istilah yang digunakan dalam judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Petani Padi Sawah Gapoktan Bumi Kencono Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”**.

- 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi** adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.¹
- 2. Pembiayaan Bermasalah** adalah pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.²

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 22.

² Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta : Kencana, 2010), cet, ke-1, h. 123.

3. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) adalah bantuan modal usaha Gabungan Kelompok Tani dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran.³

4. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan sunnah.⁴

Agar penelitian ini terarah maka dalam hal ini penulis hanya meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada pinjaman dana PUAP dalam perspektif ekonomi islam di Gapoktan Bumi Kencono, desa Sritejo Kencono kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif

Berdasarkan hasil observasi didapat data pada pembiayaan dana PUAP bahwa banyak nasabah yang melakukan pinjaman tetapi mengalami pembiayaan bermasalah maka, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada pinjaman dana PUAP petani padi sawah di Gapoktan Bumi Kencono, desa Sritejo kencono, kecamatan Kotagajah, kabupaten Lampung Tengah.

³ Permentan , *Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan*, (Jakarta :2015) h. 3.

⁴ P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011) h. 19.

2. Secara Subjektif

- a. Permasalahan ini cukup menarik bagi penulis, dimana penulis ingin memberikan sumbangan berupa pemikiran bagi pembaca sebagai bahan pembelajaran bersama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada pinjaman dana PUAP petani padi sawah.
- b. Ketersediaan literatur dan sumber data yang ada.

C. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan merupakan fenomena sosial kemasyarakatan yang terdapat di berbagai daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia. Menurut Al-Ghazali mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Islam memandang kemiskinan sebagai salah satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan ini makin merajalela, maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah dan rasa sosialnya kepada sesama.⁵

Untuk terlepas dari masalah kemiskinan Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rizki. Dalam arti sempit, kerja adalah pemanfaatan

⁵ Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h. 23.

atas kepemilikan sumber daya, bukan hanya pemilikannya semata.⁶ Rizki yang paling utama adalah rizki yang diperoleh dari hasil kerja atau keringat sendiri, dan rizki yang paling dibenci Allah adalah rizki yang diperoleh dengan cara meminta-minta.

Salah satu sektor yang dapat menanggulangi masalah kemiskinan adalah sektor pertanian. Karakteristik Indonesia sebagai negara agraris menyiratkan bahwa sektor pertanian memainkan peranan penting di negeri ini. Sebutan sebagai negara agraris tersebut tidaklah tanpa alasan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dihuni oleh penduduk yang mayoritas tinggal di perdesaan yang menggantungkan hidupnya pada sektor primer khususnya pertanian. Peran sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia secara umum adalah : (1) pembentuk produk domestik bruto (PDB), (2) salah satu sumber penghasil devisa, (3) penyedia pangan penduduk dan bahan baku bagi industri, (4) salah satu sektor yang dapat mengentaskan kemiskinan, (5) penyedia lapangan kerja, (6) salah satu sumber peningkatan pendapatan masyarakat, (7) salah satu sumber pemantapan ketahanan pangan nasional.⁷

⁶P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 66.

⁷ Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta :Erlangga, 2010), h. 289.

Tabel 1.1
Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlak
Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2010-2014⁸

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014*
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	985.470	1.091.447	1.193.452	1.310.427	1.446.722
a. Tanaman bahan Makanan	482.377	529.967	574.916	621.832	668.337
b. Tanaman Perkebunan	136.048	153.709	162.542	174.638	192.921
c. Peternakan dan hasil-hasilnya	119.371	129.297	145.720	165.162	184.246
d. Kehutanan	48.289	51.781	54.906	56.994	60.872
e. Perikanan	199.383	226.691	255.367	291.799	340.343

Sumber : BPS 2018 data diolah

*) Angka Sementara

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi terbesar PDRB provinsi Lampung adalah sektor tanaman pangan. Sektor tanaman pangan di provinsi Lampung antara lain padi, dan jagung. Padi adalah komoditi unggulan di provinsi Lampung. Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan urutan ke 3 produksi padi terbesar di pulau Sumatra.

⁸ BPS, *Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2010-2014, 2017*

Tabel 1.2
Produksi Padi Sawah Berdasarkan Provinsi di Indonesia tahun 2011-2015.⁹

Provinsi	Produksi (Ton)				
	Padi				
	2011	2012	2013	2014	2015
Aceh	1772962	1788738	1956940	1820062	2331046
Sumatera utara	3607403	3715514	3727249	3631039	4044829
Sumatera barat	2279602	2368390	2430384	2519020	2550609
Riau	535788	512152	434144	385475	393917
Jambi	646641	625164	664535	664720	541486
Sumatera selatan	3384670	3295247	3676723	3670435	4247922
Bengkulu	502552	581910	622832	593194	578654
Lampung	2940795	3101455	3207002	3320064	3641895
Kep. Bangka belitung	15211	22395	28480	23481	27068

Sumber : BPS 2018 data diolah

Provinsi Lampung terdiri dari 15 kabupaten/kota, yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, baik petani sawah maupun petani pekebun. Kabupaten Lampung Tengah merupakan kabupaten penghasil padi urutan pertama di provinsi Lampung dari tahun 2010-2015, hal tersebut berdasarkan pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Produksi tanaman padi sawah menurut kabupaten/kota tahun 2010/2015.¹⁰

Wilayah	Produksi Tanaman Padi Sawah menurut Kabupaten/Kota (Ton)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lampung Barat	160080	165342	177810	177810	121668	112063
Tanggamus	208553	201067	212317	226628	222360	284643

⁹. BPS. *Produksi Padi Sawah Berdasarkan Provinsi di Indonesia tahun 2011-2015*. 2018

¹⁰. BPS Provinsi Lampung. *Produksi tanaman padi sawah menurut kabupaten/kota tahun 2010/2015*. 2018.

Lampung Selatan	370060	395437	399900	441113	434969	488079
Lampung Timur	431981	443552	492315	509949	494722	564315
Lampung Tengah	570968	654545	660443	673564	765007	782604
Lampung Utara	117088	131155	139319	150339	153627	168942
Way Kanan	120487	145472	137161	151674	158051	149178
Tulang Bawang	187412	186728	185674	186781	228049	242728
Pesawaran	139159	146317	150526	153472	146428	170073
Pringsewu	111239	113284	113342	120275	134274	137193
Mesuji	113822	87195	144304	129791	132000	186216
Tulang Bawang Barat	60245	49155	66182	73473	79606	88443
Pesisir Barat	-	-	-	72506	72213	77605
Bandar Lampung	9336	8631	6752	9220	8966	9997
Metro	23443	24988	22555	27027	18251	34410
Provinsi Lampung	2623873	2752869	2908600	3042419	3170191	3496489

Sumber : BPS 2018 data diolah

Dibalik meningkatnya produksi padi di kabupaten Lampung Tengah terdapat permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sektor permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Akibatnya usaha pertanian di Indonesia sampai saat ini masih banyak didominasi

oleh usaha dengan skala kecil, modal yang terbatas, penggunaan teknologi yang masih sederhana, dipengaruhi oleh musim, serta wilayah pasarnya lokal.¹¹

Untuk mengatasi masalah kurangnya akses modal Kementrian Pertanian mulai tahun 2008-2014 telah melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di bawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat.¹² Untuk melaksanakan PUAP di Departemen Pertanian, Menteri Pertanian membentuk Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/kpts/OT.160/9/2007. PUAP merupakan bentuk fasilitas bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.

Pada dasarnya program PUAP adalah program bantuan teknis dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan dana yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi yang bersifat bergulir yang dikhususkan pada bidang pertanian sehingga tidak menyulitkan masyarakat dalam mengembalikan hutang.

Hutang (*qard*) adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk dapat ditagih kembali, atau dengan kata lain transaksi yang dimaksudkan harta

¹¹ Latifa Siswati, Rini Nizar, Mufti, *Pengaruh Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Terhadap Pendapatan Anggota Kelompok Pada Gapoktan Di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tayangan Raya*, (Universitas Lancang Kuning : Pekanbaru, 2015) h. 1.

¹² Peraturan Menteri Pertanian, *Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan tahun Anggaran 2015*, (Jakarta : Departemen Pertanian RI, 2015) h. 5.

yang diberikan dapat di kembalikan dengan jumlah yang sepadan dengan itu. *Qard* ini di perbolehkan dalam islam dalam maksud untuk saling tolong menolong.¹³

Sebagai mana Firman Allah SWT : Q.S. (5) Al-Maidah ; 2.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya ”.¹⁴

Memberikan pinjaman atau hutangan menurut ijma' ulama boleh dilakukan, dengan didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.¹⁵ Dalam hal pinjaman dana PUAP ini memberikan pinjaman berbentuk modal untuk usaha petani. Dalam proses penyaluran program PUAP tersebut Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menjadi lembaga tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh tenaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani.¹⁶ Gapoktan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan para anggotanya. Untuk mencapai

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Temporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017), h. 178.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2004), h. 85.

¹⁵ Ismail Nawawi, *Op.Cit*, h.178

¹⁶ Peraturan Menntri pertanian, *Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)*, (Jakarta : Depatemen Pertanian RI, 2008) h. 324.

tujuan tersebut yang berperan penting dalam pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan adalah petani.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bumi Kencono adalah salah satu Gapoktan penerima dana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan sebesar 100 juta pada tahun 2009 di Kabupaten Lampung Tengah. Gapoktan Bumi Kencono didirikan pada tanggal 11 Agustus 2008 sesuai dengan akta notaris nomor : AHU-177-AH.02.01 Th 2008. Gabungan Kelompok Tani ini berkedudukan di Desa Sritejo Kencono, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dengan luas lahan pertanian seluas 625ha dengan jumlah petani sebanyak 700 petani penggarap, serta memiliki 16 kelompok tani. Bantuan PUAP di Gapoktan Bumi Kencono ini disalurkan dalam bentuk saprodi pertanian berupa pupuk dengan sistem pinjaman agar modal tersebut dapat bergulir. Namun modal yang diberikan kepada petani mengalami kemacetan atau kredit macet, sehingga PUAP mengalami kesulitan dalam pencairan dana untuk petani yang belum mendapatkan bantuan tersebut, karena modal usaha yang diberikan atau pinjaman kepada petani mengalami kemacetan dalam pembayaran seperti yang terlihat pada tabel 1.4.¹⁷

¹⁷ Sutrisno, Sekertaris GAPOKTAN Bumi Kencono, Wawancara dengan penulis, catatan, Sritejo Kencono, 13 Januari 2018

Tabel 1.4
Laporan Perkembangan Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis
Perdesaan (PUAP)

No	Nama	Jumlah	Permasalahan
1.	Modal Awal	Rp. 100.000.000	Dana tertahan di petani sebesar Rp. 50.000.000
2.	Saprodi Pupuk	Rp. 100.000.000	
3.	Rekening Gapoktan	Rp. 60.000 000	
4.	Keuntungan PUAP (2010-2017)	Rp. 10.000.000	

Sumber : laporan keuangan Gapoktan Bumi Kencono Data diolah 2018

Dari tabel 1.4 terlihat bahwa setengah dari dana tersebut tertahan di petani. Seharusnya dana tersebut harus dikembalikan sehingga dapat di gulirkan kembali pada musim berikutnya. Pengembalian yang dilakukan bukan dalam bentuk saprodi tetapi sejumlah harga saprodi tersebut.

Bapak Sutikno adalah salah satu ketua kelompok tani di Gapoktan Bumi Kencono yang memiliki banyak petani yang mengalami kredit macet dalam pinjaman modal PUAP, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan bantuan tersebut. Banyak petani yang beranggapan bahwa pinjaman tersebut merupakan bantuan dari pemerintah yang tidak perlu dikembalikan sehingga petani tidak merasa memiliki tanggungan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.¹⁸

Melihat tidak sedikitnya petani/peminjam dana pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) yang tidak lancar dalam pengembalian pinjaman ini, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh yang akan di tuangkan dalam

¹⁸ Sutikno, Ketua Kelompok Tani, Wawancara 09 Maret 2018

bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Petani Padi Sawah Gapoktan Bumi Kencono Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah).**

D. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah usaha pada nasabah peminjam dana PUAP Gapoktan Bumi Kencono di Desa Sritejo Kencono?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap pembiayaan bermasalah dana PUAP Gapoktan Bumi Kencono di Desa Sritejo Kencono?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada PUAP Gapoktan Bumi Kencono di Desa Sritejo Kencono.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap pembiayaan bermasalah dana PUAP Gapoktan Bumi Kencono di Desa Sritejo Kencono.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat :

- a. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sajana Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Sebagai pengetahuan bagi penulis sendiri, maupun masyarakat umum tentang program PUAP dan faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dana tersebut oleh petani/peminjam.
- c. Bagi pemerintah, sebagai bahan pertimbangan evaluasi pada program PUAP kedepannya agar menjadi lebih baik lagi dan dapat di gunakan sebagai program pengentasan kemiskinan di pedesaan.

F. Deskripsi Teori

Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Berapa jumlah kelompok teori yang perlu dikemukakan/dideskripsikan, akan tergantung pada luasnya permasalahan dan secara teknis tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Deskripsi teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari

berbagai referensi, sehingga antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.¹⁹

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan.²⁰

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.²¹

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) adalah bantuan modal usaha Gabungan Kelompok Tani dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran dan di fokuskan untuk mempercepat pengembangan usaha ekonomi produktif yang diusahakan petani di perdesaan.²²

G. Metodologi Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi MA, penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengambangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan/mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi

¹⁹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 58.

²⁰ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016), h. 41.

²¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 66.

²² Peraturan Menteri Pertanian RI, *Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Tahun Anggaran 2015*, (Jakarta : Departemen Pertanian RI, 2015), h. 3.

kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.²³

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field reserch*). Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan inteksi sosial individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.²⁴ Serta penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada kondisi objek yang alamiah dimana penelti adalah sebagian instrumen kecil.²⁵ Penelitian ini dilakukan di Gapoktan Bumi Kencono desa Sritejo Kencono kecamatan Kotagajah kabupaten Lampung tengah.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, menurut M. Subana yang disebut penelitian deskriptif adalah penelitin yang menuturkan dan menafirkan data yang berkenaan dengan fakta, variabel, dan fenomena yang terjadi disaat penelitian berlangsung da menyajikan apa adanya.²⁶

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 2.

²⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h. 4.

²⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2004), h. 308.

²⁶ M. Subana, *dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Pustaka Ilmiah, 2001), h. 25.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah karena di Desa Sritejo Kencono merupakan penerima program pengembangan usaha agribisnis pedesaan yang mengalami kredit macet.

3. Subjek dan Objek penelitian

Adapun subjek dan objek dalam penelitian ini adalah :

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pinjaman dana PUAP pada petani padi sawah di Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah menurut Perspektif Ekonomi Islam.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah pengurus gapoktan Bumi Kencono dan petani petani/peminjam program PUAP.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Populasi

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Gapoktan Bumi Kencono yang memiliki 16 kelompok tani dan jumlah petani peminjam sejumlah 700 petani.²⁷

- b. Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *cluster*.²⁸ Sampel yang diambil pada penelitian ini

²⁷ Buku Anggota Gapoktan Bumi Kencono, *Dokumentasi*.

adalah 88 responden. dengan pembagian sampel 80 responden petani, 2 responden pengurus Gapoktan , dan 6 pengurus Poktan. Dengan perhitungan responden petani sebagai berikut :

Rumus Slovin
$$n = \frac{N}{1+ne^2}$$

Dimana :

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : batas toleransi kesalahan

jawab :

$$n = \frac{700}{1+700 (0,1)^2}$$

$$\frac{700}{1+7} = 87,5$$

Jadi sampel yang digunakan adalah 88 anggota Gapoktan Bumi Kencono.

5. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.²⁹ Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Adapun data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 218.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi (Jakarta : PT Riemeka Cipta, 2010), h. 129.

a. Data primer

Data primer adalah data yang bersumber dari pihak-pihak yang dianggap bisa memberikan data secara langsung kepada peneliti, adapun pihak-pihak tersebut adalah pengurus dan petani.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah Data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa ada data tidak ada riset. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.³⁰ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan, karena peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Serta observasi yang bersifat terstruktur, karena peneliti telah

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015) h. 154.

merancang secara sistematis apa yang akan diamati dan kapan dan di mana tempat yang akan di observasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³¹

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan respondennya sedikit/kecil.³²

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data. Adapun yang akan penulis wawancarai adalah pengurus Gapoktan Bumi Kencono. Wawancara ini di lakukan kepada 2 pengurus Gapoktan dan 6 pengurus Poktan yang terdapat di lingkup Gapoktan Bumi Kencono.

c. Angket atau kuisisioner

Angket atau kuisisioner adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membagikan daftar pertanyaan kepada nasabah, agar nasabah memberikan jawabannya. Penyebarak kuesioner ini dilakukan kepada 80 penerima dana PUAP di Gapoktan Bumi Kencono.

³¹ Cholid Nurbuko, dan Abu Ahmadi, *Op Cit*, h. 83.

³² Sugiyono, *ibid*, h. 137.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variabel berupa catatan, buku-buku, dan arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³³

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis kualitatif yaitu Analisis dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga akan diperoleh gambaran yang utuh dari permasalahan yang diteliti.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 244.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹

Menurut M.Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.²

Kemudian dijelaskan pada pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dijelaskan bahwa:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan Istisna'
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multi jasa.”

¹ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016), h. 41.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 160.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syari'ah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 tahun 1998 jo. UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bag hasil.³

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya : masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan itu dapat diperoleh

³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika , 2014), h. 64-65.

melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat digulirkan.

- c. Meningkatkan produktivitas, artinya : adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya : setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya : sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana

dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.⁴

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syari'ah memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya :

a. Pembiayaan menurut tujuan

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.⁵ Secara umum, pembiayaan ini ditujukan untuk pendirian perusahaan baru atau proyek baru, maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin, dan peralatan, pembelian kendaraan yang digunakan untuk kelancaran dan perluasan usaha.
- 3) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan tidak digunakan untuk usaha.⁶

⁴ *Ibid*, h. 41- 42.

⁵ *Ibid*, h. 45.

⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta : Kencana, 2016), h.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu

Sesuai jangka waktunya pembiayaan dibagi menjadi 3, yaitu pembiayaan jangka pendek, pembiayaan jangka menengah dan panjang.

1) Pembiayaan jangka pendek

Pembiayaan jangka pendek merupakan pembiayaan yang diberikan jangka waktu satu tahun. Pembiayaan ini digunakan untuk membiayai modal kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha satu tahun.

2) Pembiayaan jangka menengah

Pembiayaan jangka menengah merupakan pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun sampai tiga tahun. Pembiayaan ini diberikan untuk 3 jenis pembiayaan yaitu modal kerja, investasi dan pembiayaan konsumtif.

3) Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan jangka panjang waktunya lebih dari 3 tahun. Pembiayaan ini diberikan untuk kredit investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin, dan peralatan dan lain-lain.

c. Pembiayaan menurut sektor usaha

Dilihat dari sektor usahanya, pembiayaan dibagi menjadi sebagai berikut :

1) Sektor industri

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bererak pada sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi.

2) Sektor perdagangan

Pembiayaan ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan perdagangan besar. Pembiayaan ini dimaksudkan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan.

3) Sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan

Pembiayaan ini, diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Pembiayaan tersebut biasanya diberikan dalam bentuk modal kerja maupun investasi kepada pengusaha tambak, petani dan nelayan.⁷

4) Sektor jasa

Pembiayaan pada sektor jasa yang diberi pembiayaan oleh bank antara lain :

⁷ *Ibid*, h. 105

a) Jasa pendidikan

yaitu pembiayaan yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.⁸

b) Jasa rumah sakit

c) Jasa angkutan

d) Jasa lainnya

5) Sektor perumahan

Bank membarikan pembiayaan kepada debitur yang bergerak dibidang pembangunan perumahan. Pada umumnya, diberikan dalam bentuk pembiayaan konstruksi, yaitu kredit untuk pembangunan perumahan. Adapun cara pembayaran pembiayaan kembali yaitu dipotong dari produk rumah yang telah terjual.⁹

d. Dilihat dari segi jaminan

1) Pembiayaan dengan jaminan

Pembiayaan dengan jaminan merupakan pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap pembiayaan yang dikeluarkan atau dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

⁸ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 93.

⁹ Ismail, *Op.Cit*, h. 106.

2) Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan tanpa jaminan merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini.¹⁰

Jenis pembiayaan pada bank syari'ah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu :

a. Jenis aktiva produktif pada bank syari'ah, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut :

1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

a) Pembiayaan *mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b) Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik

¹⁰ Kasmir, *Op.Cit*, h. 92.

dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang)

a) Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah di mana bank syari'ah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah margin/keuntungan yang disepakati antara bank syari'ah dan nasabah.

b) Pembiayaan *salam*

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.

c) Pembiayaan *istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa

a) Pembiayaan *ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

b) Pembiayaan *ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina*

Pembiayaan *ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina* adalah perjanjian sewa menyewa barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

4) Surat berharga syari'ah

Surat berharga syari'ah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syari'ah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syari'ah, sertifikat dana syari'ah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syari'ah.

5) Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana bank syari'ah pada bank syari'ah lainnya dan/atau bank perkreditan syari'ah antara lain dalam bentuk giro, dan/atau tabungan wadi'ah, deposito berjangka dan/atau tabungan *mudharabah*, pembiayaan yang diberikan, Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (Sertifikat IMA) dan/atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syari'ah.

6) Penyertaan modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syari'ah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syari'ah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi dengan opsi saham atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syari'ah yang berakibat Bank Syari'ah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syari'ah.

7) Penyertaan modal sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank syari'ah dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang sebagaimana di maksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku termasuk dalam surat utang konversi dengan opsi saham atau transaksi tertentu yang berakibat bank syari'ah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.

8) Transaksi rekening administratif

Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontinjensi berdasarkan prinsip syari'ah yang terdiri atas bank garansi, *standby* L/C, dan garansi lain berdasarkan prinsip syari'ah.

9) Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI)

Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI) yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *wadi'ah*.

b. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah bentuk pinjaman, yang disebut dengan :

1) Pinjaman *Qardh*

Pinjaman *Qardh* atau talangan adalah dana/tagihan antara bank syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹¹

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financings* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPFs) yang

¹¹ Muhamad, *Op.Cit*, h. 46-48.

diartikan sebagai “*Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.¹²

2. Penetapan Kualitas Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No.9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008 kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Berikut adalah penjelasan masing-masing golongan:

a. Lancar

yaitu, apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan angunan kuat.

b. Dalam perhatian khusus

yaitu, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan

¹² Faturrahman Djamil, *Ibid*, h. 66.

secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang lancar

yaitu, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikat agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

yaitu, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan laporan keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

yaitu, apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.¹³

¹³ *Ibid*, h. 66-71.

3. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut :

a. Faktor Intern Bank

- 1) Analisis tidak tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan. Misalnya, pembiayaan diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- 2) Adanya kolusi antara pejabat bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan *over* taksasi terhadap nilai agunan.
- 3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, direktur bank sehingga tidak independen dalam memutuskan pembiayaan.
- 4) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* pembiayaan debitur.

b. Faktor Ekstern Bank

- 1) Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah

- a) Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
- b) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
- c) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pembiayaan untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana pembiayaan dicairkan, digunakan untuk modal kerja.

2) Unsur ketidaksengajaan

- a) Debitur mau melakukan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak membayar angsuran.
- b) Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.
- c) Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada unsur debitur.
- d) Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.¹⁴

¹⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 125-127.

4. Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau *nonperformng loan* merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Pembiayaan digolongkan sebagai pembiayaan bermasalah (*nonperforming loan*) adalah apabila kualitas pembiayaan tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet.

Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah itu dapat ditempuh dua cara atau strategi, yaitu penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Yang dimaksud dengan penyelamatan pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian pembiayaan adalah suatu langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud dengan lembaga hukum adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui lembaga peradilan dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.¹⁵

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah, terdapat beberapa

¹⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), h.75-76.

ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan yaitu :

Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Indonesia dan Unit Usaha Syariah, adalah. Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain adalah :

a. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

Yaitu, perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

b. *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

Yaitu, perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

c. *Restructuring* (Penataan kembali)

Yaitu, perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi :

a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank.

b) Konversi akad pembiayaan

- c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
- d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.¹⁶

Adapun mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah bisa dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan pembiayaan. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama, dan bila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan peradilan itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui lembaga hukum itu dapat berupa penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui lembaga peradilan, dan melalui arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa.¹⁷

C. Etika Utang Piutang

Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang piutang diantara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berutang piutang tersebut antara lain adalah :

1. Menepati Janji

¹⁶ Faturahman Djamil, *Op.Cit*, h. 83-84.

¹⁷ Hermansyah, *Op.Cit*. h. 77.

Menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggungjawab terhadap janji-janjinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah (5) ; 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*¹⁸

dan Q.S. Al-Isra (17) ; 34.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِٱلْعَهْدِ ۚ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.*¹⁹

2. Menyelenggarakan Pembayaran Utang

Orang yang memikul beban utang wajib terus berusaha membereskan sangkutan-sangkutan utangnya hingga tuntas. Apabila dia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayra utangnya, maka adalah suatu keutaman untuk terus bersungguh-sungguh membayar utangnya. Rasullulah bersabda “*Barang siapa menerima harta orang lain (sebagai hutang) dengan*

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2004), h. 84.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Ibid*, h. 227.

niat akan membayarnya, maka Allah membayarkan utangnya. Dan barang siapa yang menerima harta orang lain (sebagai utangnya) dengan maksud meniadakannya (tidak mau membayarnya), maka Allah pun akan membinasakannya”.(H.R. Bukhari).

3. Melarang Menunda-nunda Pembayaran Utang

Perbuatan menunda-nunda pembayaran utang dia mampu termasuk perbuatan tidak terpuji, dianggap perbuatan *zalim*, dan bahkan disa dianggap sikap orang yang mengingkari janji (*munafiq*). Hal ini sebagaimana di jelaskan Rasulullah saw, bahwa :

“Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman...”(H.R. Jamaah).

“Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan harga dari dan pemberian sanksi kepadanya” (H.R. Nasa’i, Abu Dawud, Ibn Majah, dan Ahmad).

“Tanda-tanda orang munafiq adalah bila berjanji mengingkari janji...”.
(H.R. Bukhari Muslim).

4. Lapang Dada Ketika Membyar Utang

Salah satu akhlak yang mulia ialah berlaku *tasamuh* (toleransi) atau lapang dada dalam pembayaran utang. Sikap ini merupakan kebalikan dari pada sikap menunda-nunda, mempersulit dan menahan hak orang. Rasulullah bersabda :

“Semulia-mulia mu'min, ialah orang yang mudah dalam penjualan, mudah dalam pembelian, mudah dalam membayar (utang), dan dalam penagihan (piutang)”. (H.R. Thabrani).

5. Tolong Menolong dan Memberi Kemudahan

Sikap tolong menolong dan membantu melepaskan kesusahan dan kesulitannya yang diterima oleh orang lain, Islam menilai termasuk akhlak mulia/terpuji. Rasulullah saw bersabda: *“Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang Mukmin dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di beri qiamat...”*. (H.R. Muslim)²⁰

D. Kewajiban Membayar Kredit

Setiap yang meminjam sesuatu kepada orang lain, berarti peminjam memiliki utang kepada yang memberi pinjaman. Dimana setiap utang adalah wajib dibayar, maka berdosa bagi orang yang tidak mau membayar utang dan apabila melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Apabila kita melebihi pembayaran dari jumlah pinjaman ini hukumnya boleh, asal saja kelebihan pembayaran itu merupakan kemauan dari yang berutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar utang, adapun penambahan yang dikehendaki oleh orang yang berutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perhitungan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk

²⁰ Faturrahman Djamil, *Op.Cit*, h. 75-78.

mengambilnya. Adapun piutang yang mengambil manfaatnya, maka itu adalah salah satu dari sekian cara riba.²¹

Pinjaman atau utang dapat dibagi kedalam dua jenis, yaitu :

- a. Pinjaman yang tidak menghasilkan, yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Pinjaman yang membawa hasil, yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan usahanya.

E. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

Pegembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yang selanjutnya disingkat PUAP adalah bantuan modal usaha Gabungan Kelompok Tani dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.

1. Tujuan PUAP

Tujuan utama program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah sebagai berikut :

- a. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah.

²¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* , (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 95-96.

- b. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pelaku usaha agribisnis, pengurus gapoktan, penyuluh dan penyelia mitra tani (PMT).
- c. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.
- d. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

2. Sasaran PUAP

Sasaran Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilakukan untuk petani adalah :

- a. Berkembangnya usaha agribisnis di desa terutama desa miskin sesuai dengan potensi pertanian desa.
- b. Berkembangnya Gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani untuk menjadi kelembagaan ekonomi.
- c. Meningkatkan kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, buruh tani.
- d. Berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus usaha.

3. Pola Dasar Dan Strategi Pelaksanaan PUAP

- a. Pola Dasar

Pola dasar dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM PUAP 2015 kepada Gapoktan dalam mengembangkan usaha

produktif petani untuk mendukung swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk mencapai tujuan tersebut, komponen utama dari pola dasar pengembangan PUAP, yaitu :

- 1) Keberadaan Gapoktan
- 2) Keberadaan penyuluh dan PMT sebagai pendamping
- 3) Penyaluran dana BLM kepada petani pemilik penggarap, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani
- 4) Pembekalan pengetahuan tentang PUAP bagi pengurus Gapoktan dan lain-lain.

b. Strategi Dasar

Strategi dasar Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi potensi agribisnis di perdesaan
- 2) Fasilitasi modal usaha bagi petani pemilik penggarap, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani miskin
- 3) Penguatan kelembagaan Gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dikelola dan dimiliki oleh petani
- 4) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP.

c. Strategi Operasional

Strategi operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan(PUAP) adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP dilaksanakan melalui :
 - a) Pembekalan pengetahuan bagi petugas tim teknis kecamatan, kabupaten/kota sebagai pendamping dan pembina PUAP
 - b) Rekrutmen PMT
 - c) Pembekalan pengetahuan tentang PUAP bagi pengurus Gapoktan oleh Tim Teknis kabupaten/kota, sebelum dana BLM PUAP dicairkan
 - d) Pendampingan bagi petani oleh penyuluh dan PMT bagi pengurus Gapoktan.
- 2) Optimalisasi potensi agribisnis di perdesaan dilakukan melalui :
 - a) Identifikasi potensi desa
 - b) Penentuan usaha agribisnis (hulu, budidaya, hilir) dan unggulan
 - c) Penyusunan dan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis unggulan.
- 3) Fasilitasi modal usaha bagi petani pemilik penggarap, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani miskin dilaksanakan melalui:

- a) Penyaluran dana BLM PUAP 2015 kepada pelaku agribisnis melalui Gapoktan
 - b) Pembinaan teknis usaha agribisnis dan alih teknologi
 - c) Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan sumber permodalan lainnya.
- 4) Penguatan kelembagaan Gapoktan dilaksanakan melalui :
- a) Pendampingan Gapoktan oleh penyuluh dan PMT di setiap kabupaten/kota
 - b) Peningkatan kapasitas Gapoktan membentuk lembaga ekonomi petani di perdesaan.

4. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan *output* antara lain:

- a. Tersalurkannya dana bantuan PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin anggota Gapoktan sebagai modal untuk melakukan usaha produktif pertanian.
- b. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola Gapoktan, Penyuluh, PMT.

Indikator keberhasilan *outcome* antara lain :

- a. Meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik petani pemilik penggarap, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani

- b. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha
- c. Meningkatnya aktivitas kegiatan usaha agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan.

Indikator *benefit* dan *impact* antara lain :

- a. Berkembangnya usaha agribisnis perdesaan
- b. Berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani di perdesaan yang dimiliki dan dikelola oleh petani
- c. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan.

5. Seleksi Kriteria Desa Dan Gapoktan Penerima PUAP

Dalam hal ini PUAP memiliki desa yang akan mendapatkan bantuan.

Kriteria dan seleksi Gapoktan penerima dana PUAP adalah sebagai berikut :

- a. Kriteria desa Calon lokasi PUAP :
 - 1) Desa berbasis pertanian
 - 2) Memiliki Gapoktan yang sudah aktif
 - 3) Desa belum pernah mendapatkan dana BLM PUAP

Jumlah desa calon lokasi PUAP per kabupaten/kota, ditentukan oleh

Tim PUAP Pusat dengan mempertimbangkan :

- 1) Jumlah desa yang belum mendapatkan PUAP
- 2) Jumlah alokasi desa PUAP yang telah direalisasikan sebelumnya

- 3) Alokasi dana pendukung untuk pembinaan yang disediakan oleh kabupaten/kota
- 4) Potensi integrasi lokasi desa dengan program/kegiatan lainnya.

b. **Kriteria Gapoktan Calon Penerima Dana BLM PUAP**

Gapoktan calon penerima dana BLM PUAP harus berada pada desa calon lokasi PUAP yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola usaha agribisnis
- 2) Mempunyai kepengurusan yang aktif dan dikelola oleh petani
- 3) Pengurus Gapoktan adalah petani, bukan Kepala desa/lurah atau sekretaris desa/sekertaris lurah.

Gapoktan yang akan diusulkan sebagai calon penerima dana BLM PUAP diketahui oleh kepala desa dan kepala BPP/BP3K. Pada setiap desa calon seleksi PUAP, akan ditetapkan 1 (satu) gapoktan penerima dana BLM PUAP.

6. Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB)

Setelah semua persyaratan dan kriteria telah dipenuhi oleh Gapoktan, maka Gapoktan harus menyusun Rencana Usaha Bersama (RUB) dengan kriteria :

- a. RUB disusun oleh Gapoktan berdasarkan hasil identifikasi potensi usaha agribisnis di desa

- b. Dalam menyusun RUB harus memperhatikan kelayakan usaha produktif petani seperti :
 - 1) Budidaya di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan
 - 2) Usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan dan usaha tani berbasis pertanian.
- c. RUB disusun oleh Gapoktan dibantu oleh Penyuluh. Selanjutnya RUB diverifikasi oleh PMT untuk disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota
- d. RUB yang sudah disetujui, selanjutnya disampaikan kepada TIM Pembina PUAP Provinsi bersama dengan dokumen administrasi pendukung lainnya antara lain :
 - 1) Perjanjian kerjasama
 - 2) Pakta integritas
 - 3) Berita acara serah terima uang
 - 4) Surat Perintah Kerja (SPK)
 - 5) Nomor rekening bank Gapoktan yang masih aktif
 - 6) Kwitansi/bukti pembayaran bermaterai Rp. 6000 yang ditandatangani oleh ketua Gapoktan
 - 7) Data dasar Gapoktan
 - 8) Data dasar PMT
 - 9) Data dasar penyuluh

- 10) Surat pernyataan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tentang pemanfaatan dana BLM PUAP bermatrai Rp. 6000 yang ditandatangani oleh ketua Gapoktan.

7. Organisasi Pelaksanaan PUAP

a. Tingkat Pusat

Untuk meningkatkan kordinasi antar instansi, Menteri Pertanian membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah PUAP diketuai oleh Menteri pertanian dengan anggota eselon 1 lingkup Kementrian Pertanian terkait PUAP. Tugas utama dari tim pengarah adalah merumuskan kebijakan umum dalam pengembangan PUAP, baik dengan instansi pusat maupun dengan instansi daerah. Tim pelaksana tingkat pusat diketuai oleh Direktur Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian, dibantu oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian selaku wakil ketua, serta Direktur pembiayaan Pertanian selaku sekretaris.

b. Tingkat Provinsi

Gubernur membentuk tim pembina PUAP tingkat provinsi yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas yang menyelenggarakan fungsi pertanian tanaman pangan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat provinsi. Tim pembina PUAP tingkat provinsi diketuai oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi pertanian tanaman

pangan dengan Sekertaris Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), sedangkan anggota berasal dari instansi terkait lainnya.

c. Tingkat Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota membentuk tim teknis PUAP tingkat kabupaten/kota, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas yang menyelenggarakan fungsi pertanian tanaman pangan. Tim teknis dipimpin oleh kepala dinas yang menyelenggarakan fungsi pertanian tanaman pangan dan sekretaris tim teknis oleh lembaga yang menangani penyuluh di tingkat kabupaten/kota. Susunan organisasi tim teknis kabupaten/kota terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Salah satu anggota tim teknis adalah Penyelia Mitra Tani (PMT).

d. Tingkat Kecamatan

Camat membentuk tim teknis PUAP tingkat kecamatan. Tim teknis PUAP tingkat kecamatan diketuai oleh camat dibantu oleh kepala BPP/BP3K sebagai sekretaris, Kepala Cabang Dinas Pertanian (KCD) dan kepala desa/kepala kelurahan lokasi PUAP sebagai anggota.

e. Tingkat Desa

Pelaksana PUAP tingkat desa yaitu pengurus Gapoktan didampingi oleh Penyuluh dan PMT. Kepala desa dapat mengusulkan desa, Gapoktan dan pengurus calon penerima BLM PUAP melalui BPP/BP3K, yang selanjutnya mengusulkan kepada tim teknis pelaksana PUAP

kabupaten/kota serta melakukan pembinaan dan pengawasan Gapoktan PUAP.

f. Penyuluh

Penyuluh mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melakukan identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian.
- 2) Memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis perdesaan termasuk pemasaran hasil usaha.
- 3) Membantu memecahkan permasalahan usaha tani/poktan, serta mendampingi Gapoktan selama penyusunan dokumen PUAP dan proses penumbuhan kelembagaan.
- 4) Melaksanakan pendampingan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa.
- 5) membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi, teknologi dan pasar.
- 6) Memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana BLM PUAP bersama dengan PMT.
- 7) Membantu Gapoktan dalam melaporkan perkembangan pelaksanaan PUAP.

g. Penyelia Mitra Tani (PMT)

PMT mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pertemuan reguler dengan Penyuluh dan Gapoktan
- 2) Melakukan verifikasi awal terhadap RUB dan dokumen administrasi lainnya
- 3) Melaksanakan pengawalan pemanfaatan dana BLM PUAP yang dikelola oleh Gapoktan
- 4) PMT bersama penyuluh melakukan pendampingan kepada Gapoktan
- 5) PMT bersama tim teknis kabupaten/kota lainnya melaksanakan evaluasi pelaksanaan PUAP tahun sebelumnya dan membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan PUAP kepada tim PUAP pusat melalui tim pembina PUAP provinsi.

8. Pembinaan dan Pengendalian PUAP

a. Pembinaan

1) Tingkat Pusat

Untuk menjaga keseimbangan dan keberhasilan pelaksanaan PUAP, tim PUAP pusat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan PUAP. Tingkat pembina pusat melakukan pembinaan teknis usaha produktif dilakukan oleh Unit Eselon 1 terkait lingkungan Kementerian Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya antara lain : Pembinaan teknis usaha produktif tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan, perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian,

pembinaan inovasi teknologi, dan pembinaan teknis kelembagaan Gapokta.

2) Tingkat Provinsi

Tingkat pembina provinsi fokus pada : a) peningkatan kualitas SDM yang menangani dana BLM PUAP di tingkat kabupaten/kota, b) koordinasi pengendalian dan pengawasan, 3) mengembangkan sistem pelaporan PUAP.

3) Tingkat Kabupaten

Tingkat pembinaan kabupaten/kota fokus pada kunjungan, rapat, pendampingan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap pola pelaksanaan PUAP.

b. Pengendalian

1) Tingkat Pusat

Untuk mengendalikan pelaksanaan PUAP, Kementria Pertanian mengembangkan *operation room* sebagai Pusat Pengendali PUAP berbasis elektronik yang dikelola oleh pusat data dan sistm informasi pertanian (Pusdatin). Pusdatin sebagai pengelola *operation room* bertanggung jawab mengembangkan dan mengelola *data base* PUAP yang mencakup *data base* Gapoktan, penyuluh, Penyelia Mitra Tani (PMT) dan usaha agribisnis Gapoktan. Selain itu, Pusdatin

mempersiapkan data dan mengelola laporan perkembangan pelaksanaan PUAP. Pelaporan harus sesuai dengan alur pembinaan dan pengendalian PUAP, maka terdapat laporan yang harus disampaikan oleh tim teknis kabupaten/kota. Dan disamping secara reguler tersebut, tim pembina provinsi, dan tim PUAP pusat akan membuat laporan akhir tahun untuk dilaporkan.

2) Tingkat Provinsi

Tim pembina PUAP provinsi melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dilaksanakan oleh Sekretariat PUAP provinsi (BPTP) dengan PMT dan penyuluh setiap bulan, dan kunjungan ke kabupaten/kota dan kecamatan untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan tujuan dan sasaran serta menyelesaikan permasalahan PUAP.

3) Tingkat Kabupaten

Tim teknis PUAP tingkat kabupaten/kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan ke kecamatan dan desa untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk serta menyelesaikan permasalahan PUAP. Tim teknis PUAP kabupaten/kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan

PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan ke kecamatan dan desa agar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

F. Agribisnis

1. Pengertian Agribisnis

Pada kenyataannya, terdapat banyak pengertian agribisnis yang berkembang, diantaranya adalah *Agribusiness is the sum total of all operations involved in the manufacture and distribution of farm supplies; production operations on the farm; and storage, processing and distribution of farm commodities and items* (Agribisnis adalah keseluruhan dari serangkaian operasi yang terlibat dalam produksi dan distribusi input pertanian, operasi produksi di lahan pertanian, penyimpanan, pengolahan dan distribusi komoditas pertanian dan item-itemnya).

Agribisnis adalah ilmu pengkoordinasian dari mulai penyediaan input produksi pertanian hingga proses produksi, pengolahan, dan distribusi makan dan serat. Menurut Beierlien and woolverton agribisnis tidak hanya menyangkut orang-orang yang mengolah lahan, tetapi juga orang-orang dan perusahaan yang menyediakan input, memproduksi produk-produk makanan, serta mendistribuiikan dan menjual produk makanan kepada konsumen.²²

Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran

²² Iwan Setiawan, *Agribisnis Kreatif Pilar Wirausaha Masa Depan, Kekuatan Dunia Baru Menuju Kemakmuran Hijau*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2012), h. 137-139.

yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Pertanian dalam arti luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.²³ Sehingga agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) subsistem meliputi subsistem hulu, subsistem pertanian primer, subsistem agribisnis hilir, dan subsistem penunjang.²⁴

2. Ruang Lingkup Agribisnis

Rangkaian kegiatan agribisnis meliputi 4 subsistem antara lain:

- a. Subsistem Agribisnis hulu yaitu kegiatan yang menginovasi, memproduksi, dan mendistribusikan sarana produksi pertanian, baik industrialat mesin pertanian, pupuk benih, dan obat pengendalian hama penyakit. Subsistem hulu adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (*input*) pertanian.
- b. Subsistem usaha tani yaitu aktivitas produksi primer yang dimulai dari mengolah lahan, memanfaatkan produk subsistem agribisnis hulu dan panen.
- c. Subsistem agribisnis hilir yaitu aktivitas penanganan pascapanen dan pengolahan berbagai hasil usaha tani menjadi berbagai produk olahan dan produk turunan, baik produk olahan jadi maupun setengah jadi.

²³ Muhammad Firdaus, *Manajemen Agribisnis*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012), h. 7.

²⁴ Peraturan Menteri Pertanian, *Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tahun Anggaran 2015*, (Jakarta : Departemen Pertanian RI, 2015), h. 3.

- d. Subsistem penunjang yaitu aktivitas penunjang ketiga subsistem sebelumnya, seperti pusat pelayanan informasi, lembaga keuangan, lembaga penelitian, lembaga swadaya dan lainnya.²⁵

Ada lima ruang lingkup usaha agribisnis antara lain :

a. Pertanian

Pertanian dalam arti luas adalah proses menghasilkan bahan pangan, ternak, serta produk-produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan. Sedangkan pertanian dalam arti sempit adalah proses menghasilkan bahan makanan. Pertanian dibagi menjadi dua yaitu :

1) Pertanian lahan basah atau sawah

Merupakan usaha tani yang dilaksanakan pada hamparan yang sangat membutuhkan perairan. Perairan sawah biasanya dilakukan untuk komoditi padi, jagung dan kacang-kacangan.

2) Pertanian lahan kering atau ladang

Merupakan pertanian yang tidak membutuhkan pengairan. Komoditas ladang biasanya palawija, umbi-umbian dan hortikultura.

b. Perkebunan

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang perkebunan, yang dimaksud dengan perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahaan

²⁵ Iwan Setiawan, *Ibid*, h. 138.

tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut. Perkebunan mempunyai fungsi ekonomi yaitu, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional. Perkebunan merupakan usaha tani di lahan kering yang ditanamai dengan tanaman industri yang laku di pasar, misalnya : karet, kelapa sawit, tebu, cengkeh dan lain-lain.

c. Peternakan

Ternak adalah hewan yang secara sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Sedangkan peternakan merupakan usaha tani yang dilakukan dengan membudidayakan ternak. Usaha ternak dibedakan atas :

- 1) peternakan unggas (ayam dan itik)
- 2) peternakan kecil (kambing, domba, kelinci dan lain-lain)
- 3) ternak besar (kerbau, sapi, dan kuda).

d. Perikanan

Perikanan adalah usaha manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber hayati perairan. Sumber hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencakup ikan, amfibi, dan berbagai avertabrata penghuni perairan dan wilayah yang berdekatan, serta ingkungannya. Perikanan terdiri dari :

- 1) perikanan tangkap, dapat dibedakan menjadi perikanan perairan (sungai dan danau) dan perikanan air laut.
- 2) perikanan budidaya, dapat dibedakan dalam perikanan kolam, perikanan rawa, perikanan empang, dan perikanan tambak.

e. Kehutanan

Berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, definisi kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

G. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Astri Marlia Samti (2011)	Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit bermasalah oleh debitur gerai venetra Bogor	<ul style="list-style-type: none"> - Usia debitur (X1) - jenis kelamin (X2) - Status (X3) - Pendidikan (X4) - Lama menempati tempat tinggal (X5) - Kepemilikan tempat tinggal (X6) - Jarak lokasi debitur dengan GKV (X7) - Jumlah tanggungan keluarga (X8) - Pinjaman lain (X9) - Pengalaman 	Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengembalian kredit di Gerai Venetra Bogor adalah lama menempati tempat tinggal, pinjaman lain, dan suku bunga.

			usaha (X10) - Omset usaha (X11) - Agunan (X12) - Suku bunga (X13) - Jangka waktu kredit (X14) - Pengembalian kredit (Y)	
2	Dina Aulia (2017)	Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian kredit usaha rakyat (KUR) di BRI unit pasar Mawar Bogor	- Tingkat pendidikan (X1) - Jumlah tanggungan keluarga (X2) - Frekuensi Pengembalian kredit (X3) - Sektor usaha (X4) - Lama usaha (X5) - Pendapatan per bulan (X6) - Jangka waktu kredit (X7) - Nilai agunan (X8) - Presentase penggunaan kredit (X9) - Tunggakan kredit (Y)	Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pengembalian KUR adalah tingkat pendidikan, frekuensi penerimaan kredit, dan penggunaan dana kredit.
3	Kholis Meizari, R. Hanung ismono, Achdiansyah Soelaiman (2015)	Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penegmbalian kredit usaha kelompok dalam program pengembangan usaha	- Jumlah tanggungan keluarga (X1) - Tingkat pendidikan (X2) - Usia (X3) - Pendapatan bersih rumah tangga (X4) - Jumlah pinjaman	Tingkat pengembalian kredit di desa Tanjung pandan secara keseluruhan memiliki kualitas

		agribisnis pedesaan (PUAP) di Kecamatan Bangun Rejo Lampung Tengah.	(X5) - Pengembalian kredit PUAP (Y)	pinjaman yang lancar dengan presentase sebesar 100%, sedangkan desa Cimarias termasuk dalam kategori tidak lancar. Faktor-faktor yang mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkat pengembalian kredit PUAP di Gapoktan Kecamatan Bangun Rejo Lampung Tengah adalah tingkat pendidikan, usia, pendapatan rumah tangga dan pengetahuan PUAP.
4	Ignatius Sudarno (2010)	Faktor penyebab ketidak lancaran dalam pengembalian	- Faktor pengurus - Faktor sosial ekonomi (pendidikan dan pendapatan)	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa faktor yang

		dana Co-BILD tahun 2001-2009 di Kabupaten Gunung Kidul	- Pengembalian Dana Co-BILD (Y)	berpengaruh adalah 1) Faktor pengurus, dimana terdapat penyalahgunaan setoran, peminjaman nama untuk mendapatkan pinjaman yang lebih besar. 2) faktor ekonomi yaitu pendapatan keluarga yang lebih kecil dari pengeluaran. Semua dapat terjadi karena kesalahan prosedur dan mekanisme pengembalian angsuran dan kurangnya pengawasan dari pihak pengelola dana.
--	--	--	---------------------------------	--

BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Sritejokencono

Kampung Sritejokencono terletak diantara Way Bunut dan Way Punggur di wilayah Propinsi Lampung. Pembukaan kampung ini di mulai tanggal 23 juli 1953 yang dilakukan oleh Jawatan Transmigrasi, berdasarkan Beskut Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 49 tanggal 25 Juni 1924. Oleh pemerintah kampung di jadikan daerah pertanian / perkebunan kopi, namun dengan kondisi tanah tidak cocok berubah menjadi lahan singkong, dengan ini sebagai persediaan makan para transmigrasi tersebut.

Pada akhir tahun 1955 datanglah transmigrasi asal Jawa Tengah sejumlah 170 kepala keluarga, meliputi 450 jiwa yang kemudian diberikan jatah tanah untuk pekarangan $\frac{1}{4}$ Ha dan $\frac{1}{4}$ Ha untuk lahan pertanian, kemudian masih ada tambahan kepala keluarga lagi dari pendatang pada akhir tahun 1962. Dengan keadaan kampung seperti ini pada tanggal 15 Agustus 1955 Kampung ini diberi nama Sritejokencono oleh perintis kampung Bpk. R. Soemayo dan pada waktu itu diangkat menjadi kepala kampung. Menurut yang merintis nama desa Sritejokencono ini diartikan Sri adalah dewi padi, Tejo adalah pelangi, dan Kencono adalah emas. Dengan harapan apabila desa ini memiliki nasib yang baik kelak akan menjadi gudangnya panen pangan karena Sri nya.

Adapun kepala kampung yang pernah menjabat di kampung Sritejokencono:

- a. Bpk. R. Soemaryo, Tahun 1955 – 1980
- b. Bpk. Prabowo Santoso S.Pd, Tahun 1980 – 2000
- c. Bpk. Hadi Subeno, Tahun 2000 – 2012
- d. Bpk. Budi Inwardoyo, Tahun 2012 sampai sekarang.

Saat ini kampung Sritejokencono terbentuk dengan luas wilayah 1035 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah barat berbatasan dengan kampung Saptomulyo Lampung Tengah
- b. Sebelah utara berbatasan dengan desa Tulung Balak Lampung Timur
- c. Sebelah timur berbatasan dengan desa Trisnomulyo Lampung Timur
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Wonosari Lampung Timur.

2. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Senada dengan desa lain, masalah penduduk desa Sritejokencono adalah bagaimana mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mencapai manusia yang berkualitas.

Program kependudukan meliputi pengendalian kelahiran, penuruann tingkat kematian, perpanjangan angka harapn hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai model pembagunan. Desa Sritejokencono pada tahun 2015 berjumlah 4272 jiwa dengan 1136 kepala keluarga yang terdiri dari laki-laki 2217 jiwa dan 2055

jiwa perempuan. Mata pencaharian penduduk desa Sritejokencono beragam mulai dari karyawan, Pedagang, tani, penukang dan buruh tani.

Masalah kependudukan selalu berkaitan dengan masalah ketengakerjaan. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan tingginya pula permintaan akan lapangan pekerjaan. Dibawah ini tabel banyaknya pencari kerja desa Sritejokencono berdasarkan usia, seperti dibawah ini :

Tabel 3.1
Jumlah Pencari Kerja Menurut Tingkat Usia Di Desa Sritejokencono

No	Usia	Jumlah
1	10-14 tahun	233
2	15-19 tahun	481
3	20-26 tahun	612
4	27-40 tahun	441
5	41-56 tahun	552
6	57 tahun ke atas	610

Sumber : Monografi Desa Sritejokencono Tahun 2015.

3. Gambaran Umum Gapoktan Bumi Kencono

Gabungan kelompok tani (Gapoktan) Bumi Kencono adalah Gapoktan yang berada di Desa Sritejokencono, Kec. Kotagajah, Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung yang berdiri pada tanggal 23 Januari 2007. Adapun maksud dari pendirian Gapoktan ini adalah:

- a. Memfasilitasi secara khusus dari kepentingan para anggota dan mayarakat tani pada umumnya.
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dalam rangka memajukan sektor pertanian serta meningkatkan produktivitasnya dan kualitas hasil pertanian anggota.

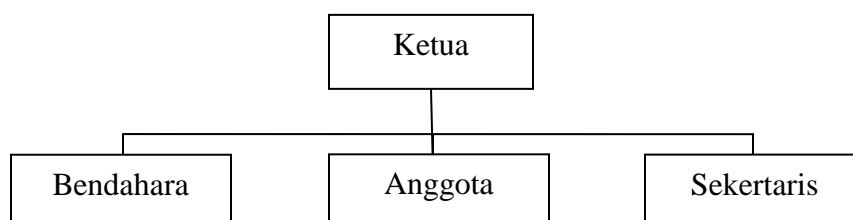
- c. Meningkatkan pendapatan hasil pertanian dengan pengolahan dan pemasaran yang terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota tani pada umumnya.
- d. Meningkatkan sumber daya dan kesejahteraan para anggota dengan melakukan pendidikan, bimbingan, penyuluhan serta memberikan bantuan modal untuk usaha pertanian.

Adapun tujuan dari pendirian dari Gapoktan ini adalah sebagai berikut :

- a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan yang meliputi budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan dan pemasaran hasilnya.
- b. Mengusahakan dan mengembangkan industri hasil dari pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan holtikultura.
- c. Mengusahakan dan mengembangkan industri peternakan ayam, kambing, sapi dan hewan-hewan ternak lainnya.

Adapun Struktur Kepengurusan Gapoktan Bumi Kencono adalah Sebagai berikut:

Bagan 3.1 Struktur Gapoktan Bumi Kencono



Gapoktan Bumi Kencono di ketuai oleh Bpk. Ngadino, Bendahara Bpk. Parjono, dan Sekertaris Bpk. Sutrisno. Adapun anggota dari Gapoktan Bumi kencono sebagai berikut: Harapan Maju I, Harapan Maju II, Harapan Maju III, Harapan Makmur I, Harapan Makmur II, Harapan Makmur III, Tani Jaya I, Tani Jaya II, Tani Jaya III, Ngudi Luhur, Ngudi Makmur, Sumber rejeki, Sri Rejeki, Sri Makmur, Sri Widodo, Sopo Nyono.

B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah petani penerima pembiayaan dari program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Gapoktan Bumi Kencono, Desa Sritejokencono, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah. Responden yang menjadi objek penelitian ini adalah 88 responden, melalui daftar pertanyaan di dapatkan kondisi responden tentang jenis kelamin dan luas lahan. Penggolongan yang dilakukan terhadap responden dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan akurat mengenai gambaran responden yang digunakan sebagai objek penelitian. Gambaran umum responden objek penelitian ini dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Kelamin

Berdasarkan data yang telah diolah maka hasil yang didapat dari persebaran responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-Laki	85	96,59%
2	Perempuan	3	3,41%
	Total	88	100%

Sumber : Data primer diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dari penelitian yang dilakukan terhadap 88 responden menunjukkan bahwa penggolongan berdasarkan jenis kelamin yang paling banyak adalah laki-laki sebesar 85 responden (96,59%) dari total responden, dan perempuan hanya 3 responden (3,41%) dari total responden.

2. Luas area lahan

Berdasarkan hasil data yang diolah maka hasil persebaran responden berdasarkan luasan area lahan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.3
Karakteristik responden berdasarkan luas area lahan

No	Luas Area Lahan	Jumlah Responden	Persentase
1	0,125 ha	6	6,82 %
2	0,25 ha	38	43,18%
3	0,375 ha	12	13,64%
4	0,50 ha	14	15,91%
5	0,675 ha	4	4,54%
6	0,75 ha	9	10,23%
7	0,875 ha	5	5,68%
	Total	88	100%

Sumber : Data primer diolah 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persebaran responden berdasarkan luas area lahan yang paling banyak menerima pembiayaan dari

PUAP adalah 38 responden (43,18%) dengan luas lahan sebesar 0,25 ha dari total semua responden.

C. Kondisi Usaha Petani Yang mendapat Fasilitas Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Desa Sritejokencono.

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah program dari pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani miskin bak petani pemilik, petani penggarap buruh tani maupun rumah tangga tani. Di Desa Sritejokencono khususnya Gapoktan Bumi kencono mendapatkan bantuan pada awal tahun 2009 yang kemudian dana PUAP tersebut di salurkan melalui kelompok tani, bukan kepada individu atau perorangan. Bantuan di Gapoktan Bumi Kencono di salurkan dalam bentuk pinjaman modal dan pinjaman saprodi pertanian (pupuk, dan obat-obatan) yang diberikan setiap kali musim tanam.¹

Pengembangan usaha di Desa Sritejo Kencono yang dilakukan oleh petani yang dibiayai oleh PUAP belum mencapai tujuan dan sasaran karena pembiayaan dari dana PUAP di rasa kurang efektif sehingga kurang berkembangnya usaha yang dilakukan oleh petani. Usaha yang di lakukan oleh para petani sering kali mengalami kegagalan dalam usaha misalnya gagal panen yang di sebabkan oleh serangan hama dan penyakit yang sulit di kendalikan pada tanaman padi sehingga menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik. Adapula sebagian dari petani yang sengaja tidak mengembalikan pinjaman padahal usaha

¹ Ngadino, Ketua Gapoktan Bumi Kencono, *Wawancara*, Tanggal 5 Juli 2018.

yang mereka lakukan memperoleh hasil. Dengan tidak berkembangnya usaha petani, gagal panen dan kesegajaan petani tidak membayar pinjaman makan menimbulkan pembiayaan bermasalah yang harus segera ditanggulangi, karena apabila tidak segera di selesaikan akan menghambat penyaluran dana PUAP pada musim tanam selanjutnya.²

Data yang diolah dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari jawaban dari kuesioner dari responden sebagai anggota sampel petani anggota Gapoktan Bumi Kencono penerima pembiayaan dari PUAP. Pertanyaan dari kuesioner berisi 10 pertanyaan yang memiliki 3 alternatif jawaban. Langkah selanjutnya yaitu penulis akan mengintrepetasikan hasil jawaban sesuai dengan item-item kuesioner yang telah diajukan kepada responden serta diambil kesimpulan. Pengolahan dan penganalisisan data tersebut adalah sebagai berikut:

Berikut ini tabel bagaimana jawaban responden terhadap usaha yang dilakukan sebelum menerima dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), sebagai berikut :

Tabel 3.4
Jawab responden tentang usaha yang dilakukan sebelum mendapat dana PUAP

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Presentase
1	Sulit meningkatkan usaha	14	17,50 %
2	Kurangnya modal	56	70,00%
3	Usaha tidak berkembang	10	12,50 %
		80	100%

Sumber : Data Primer diolah kuesioner no 1

² Sutikno, Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur 3, *Wawancara*, Tanggal 5 Juni 2018

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 14 responden (17,50%) memilih sulit meningkatkan usaha, 56 responden (70,00%) memilih opsi kurangnya modal dan 10 responden (12,50%) memilih opsi usaha tidak berkembang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa masalah yang dialami petani petani sebelum mendapat pembiayaan PUAP adalah karena kurangnya modal yang dimiliki sebanyak 56 responden (70,00%) yang mengakibatkan sulitnya meningkatkan usaha sehingga usaha tidak dapat berkembang dengan baik.

Untuk mengetahui bagaimana jawaban responden tentang alasan memperoleh fasilitas kredit dari PUAP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Jawaban responden tentang alasan memperoleh fasilitas kredit dari PUAP

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Presentase
1	Memperbesar hasil usaha	13	16,25%
2	Modal usaha	67	83,75 %
3	Konsumsi	0	0 %
		80	100%

Sumber : Data primer diolah kuesioner no 2

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 13 responden (16,25%) menyatakan alasan memperoleh fasilitas kredit adalah untuk memeperbesar hasil usaha, 67 responden (83,75%) untuk modal usaha dan tidak ada yang menggunakan untuk konsumsi (0%).

Dapat diketahui 67 responden (83,75%) petani responden memperoleh fasilitas kredit adalah untuk modal usaha, karena banyak petani pada saat akan

memasuki musim tanam mengalami masalah kekurangan modal sehingga para petani tersebut mendapatkan fasilitas kredit dana PUAP.

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai waktu pencairan dana PUAP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Jawaban responden tentang waktu pencairan dana PUAP

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Presentase
1	Cepat	65	81,25 %
2	Lama	15	18,75 %
3	Sangat Lama	0	0 %
		80	100%

Sumber : Data Primer Diolah Kuesioner no 3

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa 65 responden (81,25%) menyatakan bahwa pencairan dana PUAP itu cepat, sedangkan 15 responden (18,75%) menyatakan waktu pencairan kredit PUAP lama dan tidak ada yang menyatakan bahwa pencairan kredit PUAP sangat lama.

Responden atau petani yang menyatakan bahwa pencairan Kredit PUAP cepat karena setelah panen para pengelola dana PUAP akan melakukan penagihan dana yang digunakan sehingga pada saat musim tanam yang akan datang dana tersebut dapat cepat digulirkan kembali kepada petani baik dalam bentuk pupuk ataupun obat-obatan yang dibutuhkan oleh para petani tersebut. Apabila pada saat jatuh tempo banyak petani yang belum membayar pinjaman maka pengelola atau pengurus harus menutupi kekurangan dengan menggunakan uang pribadi dari

pengelola/pengurus, karena setiap selesai masa panen dana PUAP tersebut harus terkumpul dan tidak boleh kurang.³

Untuk melihat jawaban responden tentang hasil usaha yang dijalankan setelah mendapatkan pinjaman PUAP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Jawaban responden tentang hasil usaha yang dijalankan setelah
mendapatkan pinjaman PUAP

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Presentase
1	Meningkat	45	56,25 %
2	Biasa Saja	35	43,75 %
3	Menurun	0	0%
		80	100%

Sumber : Data Primer Diolah Kuesioner no 4

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui 45 responden (56,25%) menyatakan bahwa setelah mendapat pinjaman PUAP hasil usaha yang dilakukan meningkat, 35 responden (43,75%) memilih opsi biasa saja atau tidak ada perubahan.

Responden yang menyatakan bahwa pendapatan usaha mereka meningkat karena mereka mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan pupuk sehingga dapat melakukan pemupukan tanaman selalu tepat waktu dan hal tersebut berpengaruh terhadap hasil yang di dapatkan walaupun peningkatan tersebut tidak terlalu banyak.

Untuk melihat bagaimana jawaban responden mengenai keuntungan yang diperoleh setelah mendapat pinjaman PUAP adalah sebagai berikut :

³ Ngadino, *Ibid*.

Tabel 3.8
Jawaban responden tentang keuntungan yang diperoleh setelah mendapat pinjaman PUAP

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Presentase
1	Kurang dari Rp. 500.000	28	35,00%
2	Rp. 500.000 – Rp. 1000.000	52	65,00%
3	Rp. 1000.000 – Rp. 5000.000	0	0%
		80	100%

Sumber : Data Primer Diolah Kuesioner no 5

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 28 responden (35,00%) menyatakan bahwa keuntungan yang didapatkan setelah mendapatkan pinjaman PUAP adalah kurang dari Rp.500.000 dan 52 responden (65,00%) responden menyatakan keuntungan yang di dapatkan adalah Rp.500.000 – Rp. 1000.000.

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa dari 80 responden 52 diantaranya menyatakan bahwa pendapatan yang mereka dapatkan adalah Rp.500.000 – Rp.1000.000 hal ini dikarenakan petani yang mendapatkan pinjaman adalah petani miskin yang luas lahannya kurang dari 1 hektar, dari pendapatan tersebut petani lebih mengutamakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah anak mereka daripada untuk membayarkan pinjaman PUAP.

Pada tabel dibawah ini adalah tabel yang menyatakan jawaban responden tentang adanya pengawasan dari pihak pengelola PUAP terhadap usaha yang dilakukan oleh petani nasabah, sebagai berikut :

Tabel 3.9
Jawaban responden tentang pengawasan dari pihak pengelola PUAP setelah
mendapat pinjaman modal

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Presentase
1	Sesekali	68	85,00%
2	Sering sekali	12	15,00%
3	Tidak Pernah	0	0%
		80	100%

Sumber : Data Primer Diolah Kuesioner no 6

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persebaran jawaban responden terhadap pengawasan yang dilakukan oleh pengelola PUAP setelah mendapatkan pinjaman adalah 68 responden (85,00%) menyatakan bahwa sesekali ada penawasan dan 12 responden (15,00%) menyatakan jawaban tidak pernah.

Dari presentasi diatas dapat diketahui bahwa responden setuju dengan pilihan sesekali karena memang hanya sesekali adanya pengawasan dari pihak pengelola PUAP terhadap usaha yang dilakukan oleh petani, misalnya penyuluhan-penyuluhan tentang cara bercocok, pemberantasan hama dan lain-lain, sementara dalam Pengawasan PUAP melakukan pertemuan rutin untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh petani dilapangan, serta memberikan peringatan terhadap pengelola tentang waktu peminjaman dan pembayaran dari kelompok kepada petani.⁴

⁴ Sutikno, *Ibid.*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Gapoktan Bumi Kencono.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) kepada para petani merupakan bentuk pemberian modal untuk petani dan dana tersebut dikuasai oleh petani. Dengan demikian pihak pengelola dana PUAP harus selalu berusaha melakukan pengawasan terhadap usaha yang dilakukan oleh petani agar dana tersebut benar-benar digunakan dan dimanfaatkan untuk usaha yang menguntungkan baik untuk PUAP dan petani khususnya. Para Pengelola PUAP menginginkan agar resiko dapat diminimalisasikan bahkan bila perlu pihak PUAP meniadakan resiko, namun dalam setiap usaha tidak mungkin tanpa adanya resiko terlebih dalam hal kredit PUAP ini masih ada peminjam yang tidak mengembalikan pinjamannya tepat waktu.

Adapun sistem atau prosedur peminjaman di Gapoktan Bumi Kencono yang diberikan dari pihak PUAP kepada petani adalah melalui sistem musyawarah dan tanpa adanya jaminan, sehingga tingkat resiko tidak bisa dihindari. Sehingga apabila terdapat petani yang terlambat dalam pembayaran pinjaman maka pengelola PUAP harus menutupi kekurangan dana tersebut.¹

¹ Mu'anam, Ketua Kelompok Tani Jaya II, Wawancara, Tanggal 10 Juli 1018.

Untuk mengetahui fakto-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada nasabah Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak pengelola atau pengurus PUAP dan menyebarkan kuesioner kepada petani yang meminjam dana PUAP agar didapatkan hasil yang maksimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) petani padi sawah Gapoktan Bumi Kencono, Desa Sritejokencono, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut :

a. Faktor Internal

Faktor internal yang terjadi di Gapoktan Bumi Kencono adalah

- 1) Tidak adanya penilaian dan jaminan terhadap petani penerima dana PUAP

Proses penyaluran dana PUAP yang diberikan oleh pemerintah di salurkan melalui Gapoktan penerima yang selanjutnya di salurkan kepada masing-masing poktan yang terdapat di Gapoktan tersebut untuk selanjutnya di salurkan kepada para petani anggota Gapoktan. Penerima dana ini adalah petani anggota Gapoktan. Di Gapoktan Bumi Kencono yang memiliki 16 poktan ini masing-masing poktan memiliki AD/ART masing-masing. Ada beberapa poktan dalam penyalurannya di berikan kepada petani anggota pemohon, dan ada juga poktan yang memberikan bantuan tersebut secara bergulir/bergantian kepada semua anggotanya. Dalam proses penyaluran di Gapoktan Bumi Kencono

termasuk di dalamnya adalah poktan penerima dana PUAP, tidak di berlakukannya penilaian dan tidak adanya jaminan pada saat petani mengajukan permohonan ataupun pada saat mendapatkan pinjaman di sana semua hanya berdasarkan kesepakatan bersama dan kepercayaan. Padahal penilaian dan jaminan ini perlu di lakukan karena dengan adanya penilaian pengelola atau pengurus dapat mengetahui kemampuan untuk membayar, karakter, usaha yang dilakukan oleh peminjam sehingga dapat mengurangi resiko yang tidak di inginkan di masa depan. Penggunaan jamina dalam sistem pinjam meminjam bisa jadi perlu di lakukan hal ini bertujuan untuk mendorong peminjam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah di tetapkan di AD/ART masing-masing poktan.

b. Faktor Eksternal

1) Rasa tanggung jawab yang kurang dari petani

Tanggung jawab adalah perbuatan dimana seseorang berani menanggung apa yang telah diucapkan dan dilakukan. Dalam proses pengembalian dana PUAP pada awal pemberian pinjaman dari PUAP tingkat tanggung jawab dari petani sangat tinggi hal ini di buktikan dengan jumlah pengembalian yang mencapai 100% setiap musim panen tiba, ini berlangsung selama 4 tahun dari tahun 2010-2014. Namun pada tahun-tahun selanjutnya rasa tanggung jawab untuk pengembalian ini menurun hanya 75% bahkan hanya 50%. Hal ini dikarenakan pada saat usaha para petani berhasil mereka enggan untuk

mengembalikan pinjaman melainkan digunakan untuk membeli kendaraan, memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya, sengaja tidak membayar pada saat waktu jatuh tempo dengan alasan bahwa dana tersebut adalah dana hibah dari pemerintah untuk petani sehingga tidak ada kewajiban untuk mengembalikan.²

Terkait tentang masalah diatas Islam telah mengatur tentang masalah utang piutang, dimana Allah berfirman pada QS. Al-Baqarah (2) ; 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...^٣

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*”.³

Dari penggalan ayat diatas berisikan nasihat kepada setiap orang yang melakukan transaksi hutang piutang dengan nasihat pokok utama. Pertama, dikandung oleh pertanyaan *untuk waktu yang ditentukan*. Ini bukan saja mengisyaratkan bahwa ketika berhutang masa pelunasannya harus ditentukan. Bukan hanya itu namun juga mengensankan bahwa ketika berhutang seharusnya sudah tergambar dalam benak pengutang bagaimana serta dari sumber mana pembayaran diandalkan.⁴

Bagi orang-orang yang lalai dalam hutangnya Rasulullah bersabda yang artinya “*Barang siapa menerima harta orang lain (sebagai*

² Sutikno, *Opcit.*

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2004), h. 37.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume I*, (Jakarta : Lentera Hati, 2006. h. 603.

hutang) dengan niat akan membayarnya, maka Allah akan membayarkan hutangnya. Dan barang siapa yang menerima hutang orang lain (sebagai hutangnya) dengan maksud meniadakannya (tidak mau membayarnya), maka Allah pun akan membinasakannya".
(HR. Bukhari)⁵

2) Gagal panen

Padi adalah salah satu tanaman yang ditanam oleh petani khususnya bagi petani anggota Gapoktan Bumi Kencono. Para petani umumnya dan petani peminjam pada khususnya sangat menaruh harapan terhadap hasil dari usaha tanaman padi ini, namun sering kali mengalami kegagalan usaha atau gagal panen, misalnya terkena hama dan penyakit. Karena adanya serangan hama dan penyakit tersebut hasil panen padi menjadi berkurang bahkan ada yang tidak dapat hasil sama sekali, sehingga petani kesulitan untuk membayar pinjaman karena hasil panen mereka yang sangat sedikit walau sebenarnya petani memiliki niatan untuk membayar pinjaman.⁶ Hal ini sesuai dengan tabel 4.1.

Tabel 4.1 menunjukkan jawaban responden tentang kendala yang dihadapi oleh para petani pada saat memasuki jatuh tempo dalam membayar pinjaman yang diberikan oleh PUAP, sebagai berikut :

⁵ Fathurahman jamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 75.

⁶ Sutriso, Bendahara Gapoktan Bumi Kencono, *Wawancara*, Tanggal 18 Juni 2018.

Tabel 4.1
Jawaban responden tentang kendala dalam membayar
pinjaman yang sudah jatuh tempo

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Presentase
1	Mengalami Gagal Panen	72	90,00%
2	Adanya Keluarga yang sakit	8	10,00%
3	Mengalami Musibah Bencana Alam	0	0
		80	100%

Sumber : Data Primer Diolah Kuesioner no 8

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 72 responden (90,00%) memberikan alasan mereka tidak dapat membayar pinjaman tepat waktu adalah karena gagal panen, 8 responden (10,00%) memilih alasan keluarga yang sakit dan 0 responden untuk jawaban mengalami musibah bencana alam sehingga tidak dapat membayar pinjaman pada saat telah masuk waktu jatuh tempo.

B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembiayaan Bermasalah Dana PUAP di Gapoktan Bumi Kencono, Desa Sritejo Kencono.

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan merupakan trobosan dari Kementrian pertanian yang digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan jangka panjang. Pelaksanaan program PUAP di Gapoktan Bumi Kencono telah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam, dimana dalam proses penyaluran sesuai dengan prinsip keadilan. Keadilan dalam Islam bukan berarti sama rata, melainkan sesuai dengan apa yang telah di korbakan atau sesuai dengan kebutuhan, hal ini telah di terapkan pada Gapoktan Bumi kencono dimana pemberian pinjaman sesuai dengan luas

lahan yang mereka miliki. Dilihat dari sistem pendistribusian bantuan yang dilakukan oleh pihak Gapoktan telah sesuai dengan konsep Islam yaitu keadilan, dimana keadilan disini yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan terkadang keadilan tidak harus sama rata, akan tetapi memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya dengan memperhatikan maslahatnya untuk diri sendiri, keluarga, agama, dan umat. Yang paling terpenting keadilan dalam islam tidak boleh adanya kata mendzolimi dan terdzolimi. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa' (4) ; 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.⁷

Dari ayat diatas dapat di jelaskan bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan kalian, wahai orang-orang yang beriman, untuk menyampaikan segala amanat Allah atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum ini adalah pesan tuhanmu, maka jagalah dengan baik, karena merupakan pesan terbaik yang diberikan-Nya kepada kalian. Allah selalu maha mendengar apa yang diucapkan dan maha melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan orang yang tidak

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro. 2004), h. 69.

melaksanakannya, dan orang-orang yang menentukan hukum secara adil atau dzolim masing-masing akan mendapat ganjarannya.⁸

Dalam proses pengembalian pada masing-masing poktan memiliki aturan tersendiri yang telah disepakati oleh pihak pengelola dan petani peminjam. walaupun telah di buat kesepakatan atau perjanjian namun masih banyak petani peminjam di Gapoktan Bumi Kencono yang tidak tepat waktu dalam melakukan kewajibannya. Padahal dalam urusan utang piutang harus mematuhi adanya perjanjian atau amanah. Oleh karena itu apabila seseorang telah mendapatkan pinjaman dari pihak pemberi amanah maka sebaiknya jangan mengingkari perjanjian. Apabila ia mengingkari perjanjian yang telah disepakati seblumnya maka ia sudah tidak menjaga amanah dan hukumnya adalah dosa. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Anfaal (8) : 27.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*”.⁹

Untuk mengatasi masalah peminjam tidak dapat menepati janji dalam hal ini pembayaran kewajiban pada waktu jatuh tempo karena keadaan yang sangat sulit atau gagal dalam usahanya, maka pihak yang memberikan pinjaman harus memberikan keringanan berupa tambahan jangka waktu pembayaran sampai si peminjam mampu mengembalikan kewajibannya membayar hutang. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) : 280.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, (Jakarta : Lentera Hati, 2006. h.

⁹ Departemen Agama RI, *Ibid*.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*.¹⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika posisi seseorang sedang dalam keadaan benar-benar tidak mampu untuk membayar maka ada dua pilihan yang pertama yaitu memberikan tenggang waktu pembayaran dengan tanpa paksaan dan yang kedua adalah mengikhlaskan. Namun jika sejatinya peminjam tersebut mampu namun dengan sengaja menunda pembayaran maka orang yang menghutangi boleh memaksa untuk melunasi hutangnya.

Karena Nabi Muhammad Saw menyebut orang yang menunda pelunasan hutang padahal ia mampu sebagai orang yang dzolim. Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah Saw bersabda :

Artinya : *“Menunda pelunasan hutang yang dilakukan orang mampu adalah kedzoliman”*. (HR.Bukhari Muslim).¹¹

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada pembiayaan melalui dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) ini maka harus diselesaikan sesuai dengan itikad peminjam dan melihat kondisi usaha dari si peminjam serta harus berdasarkan pada prinsip kejujuran serta berdasarkan pada aturan Islam. Di dalam Islam dalam hal utang piutang pihak yang memberikan pinjaman tidak boleh memaksa si peminjam. Dalam hal ini sudah terlihat jelas bahwa pemberi pinjaman atau penyedia dana tidak boleh

¹⁰ Departemen Agama RI, *Ibid*.

¹¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Berasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 77.

melakukan pemaksaan kepada peminjam yang sedang dalam keadaan susah untuk membayar hutang-hutangnya terlebih lagi menggunakan kekerasan, pihak pemberi pinjaman harus memberikan tenggang waktu kepada peminjam yang tidak mampu atau belum mampu membayar pada saat jatuh tempo sampai mereka mampu untuk membayar hutangnya.

Pihak pengelola PUAP dalam menangani pembiayaan bermasalah di Gapoktan Bumi Kencono tidak pernah melakukan pemaksaan terlebih menggunakan kekerasan kepada petani yang belum sanggup untuk membayar kewajibannya tepat waktu jatuh tempo. Pihak pengelola PUAP sering memeberika solusi atau upaya-upaya pemecahan masalah bagi para petani yang belum bisa membayar misalnya dengan memberikan kelonggaran jangka waktu pembayaran. Di Gapoktan Bumi Kencono dalam meminjamkan dana tidak memerlukan adanya jaminan, mereka hanya berdasarkan kesepakatan musyawarah bersama dan tidak adanya denda atau tambahan dalam pinjaman yang diberikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai karya tulis ini, sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan bermasalah pada pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP) di Gapoktan Bumi Kencono, Desa Sritejokencono.

Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :

- a. Faktor internal, Tidak adanya penilaian dan jaminan terhadap petani penerima dana PUAP
 - b. Faktor eksternal, antara lain rasa tanggung jawab yang kurang dari petani dan gagal panen.
2. Tinjauan ekonomi islam terhadap pembiayaan bermasalah dana puap di Gapoktan Bumi Kencono, Desa Sritejo Kencono.

Dalam tinjauan ekonomi Islam pelaksanaan program PUAP di Gapoktan Bumi Kencono telah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yaitu keadilan, hanya saja dalam proses pengembalian para peminjam tidak tepat waktu dalam pengembalian sesuai perjanjian yang disepakati dan tidak saling merugikan serta digunakan untuk kebaikan. Seseorang yang meminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan pada saat waktu yang telah di

tetapkan dan segera untuk melunasi kewajibannya. Jaminan dalam utang diperbolehkan karena untuk memperkecil adanya resiko pembiayaan bermasalah yang akan merugikan pihak pengelola PUAP. Jika peminjam dalam keadaan tidak dapat membayar tepat waktu pada saat jatuh tempo akibat gagal panen atau usahanya tidak berhasil maka si pemberi pinjaman harus memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran sampai si peminjam dapat melunasi kewajibannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas, sebagai upaya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, adapun saran yang dapat diberikan bagi pihak pengelola atau pengurus PUAP adalah sebagai berikut :

1. Penulis memberikan saran kepada pihak PUAP Gapoktan Bumi Kencono untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada petani pemohon kredit agar dana tersebut dapat tersalurkan kepada petani yang membutuhkan dan sanggup untuk mengembalikan tepat waktu sehingga dana tersebut dapat terus tersalurkan. Untuk memperkecil adanya resiko pembiayaan bermasalah sebaiknya di Gapoktan Bumi Kencono pada saat petani ingin mengajukan permohonan kredit petani dapat memberikan jaminan.
2. Untuk para peminjam seharusnya memenuhi setiap akad yang telah di sepakati atau di setujui bersama, agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam

perjanjian, karena dalam utang piutang terdapat etikanya yaitu, menepati janji, menyelenggarakan dalam pembayaran utang, melarang menunda-nunda pembayaran utang, lapang dada ketika membayar utang, serta tolong-menolong dan memberi kemudahan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi Lampung. *Produksi tanaman padi sawah menurut kabupaten/kota tahun 2010/2015*. 2018.
- BPS. *Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2010-2014*. 2017.
- BPS. *Produksi Padi Sawah Berdasarkan Provinsi di Indonesia tahun 2011-2015*. 2018
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : CV Penerbit Diponegoro. 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika. 2014.
- Hendi Suhendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2011.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Ismail. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta : Kencana. 2010.
- Iwan Setiawan. *Agribisnis Kreatif Pilar Wirausaha Masa Depan, Kekuatan Dunia Baru Menuju Kemakmuran Hijau*. Jakarta : Penebar Swadaya. 2012.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Latifa Siswati, Rini Nizar, Mufti, *Pengaruh Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Terhadap Pendapatan Anggota Kelompok Pada Gapoktan Di*

Kelurahan Rejosari Kecamatan Tayangan Raya. Universitas Lancang Kuning : Pekanbaru. 2015.

M. Subana. *dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Pustaka Ilmiah. 2001.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*, Jakarta : Lentera Hati, 2006.

-----, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*, Jakarta : Lentera Hati, 2006.

Mudrajad Kuncoro. *Masalah, Kebijakan dan Politik Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta :Erlangga. 2010.

Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016.

Muhammad Firdaus. *Manajemen Agribisnis*. Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2012.

Nurul Huda. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2015.

P3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta : Rajawali Pers. 2011.

Peraturan Menntri Pertanian. *Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)*. Jakarta : Depatemen Pertanian RI. 2008.

Peraturan Menteri Pertanian RI. *Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Tahun Anggaran 2015*. Jakarta : Departemen Pertanian RI. 2015.

Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2015.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2004.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Jakarta : PT Riemeka Cipta, 2010.

Mu'anam. Ketua Kelompok Tani Jaya II. Wawancara, Tanggal 10 Juli 1018.

Ngadino. Ketua GAPOKTAN Bumi Kencono. Wawancara, Tanggal 5 Juli 2018.

Sutikno. Ketua Kelompok Tani Harapan Makmur III. Wawancara 09 Maret 2018.

Sutrisno. Sekertaris GAPOKTAN Bumi Kencono. Wawancara dengan penulis. catatan. Sritejo Kencono. 13 Januari 2018.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lia Ariyanti
NPM : 1451010068
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Petani Padi Sawah Gapoktan Bumi Kencono Desa Sritejo Kencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 4 Oktober 2018
Penyusun

Lia Ariyanti
NPM.1451010068

Daftar Wawancara

1. Bagaimana sejarah Gapoktan Bumi Kencono dalam mendapatkan bantuan dana PUAP?
2. Apakah seluruh petani yang ada di Desa Sritejokencono dapat menjadi anggota Gapoktan?
3. Bagaimana prosedur penyaluran bantuan modal atau dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Gapoktan Bumi Kencono?
4. Apakah ada penilaian terhadap anggota agar mendapatkan bantuan modal?
5. Berapakah jumlah pinjaman yang paling besar diberikan oleh pengurus Gapoktan untuk petani?
6. Apa sajakah usaha yang dilakukan petani setelah mendapatkan pinjaman?
7. Apa saja usaha yang dilakukan pengurus Gapoktan terhadap pengembangan usaha petani?
8. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Gapoktan Bumi Kencono?
9. Faktor internal dan eksternal apakah yang paling dominan menyebabkan pembiayaan bermasalah di Gapoktan Bumi Kencono?
10. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pengurus Gapoktan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah?

KUISIONER PENELITIAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

**(Studi Pada Petani Padi Sawah Gapoktan Bumi Kencono Desa Sritejo Kencono
Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh : Lia Ariyanti
Prodi : Ekonomi Syari'ah

Petunjuk Pengisian Angket :

1. Tulis identitas anda secara lengkap
2. Kuisioner ini digunakan untuk kepentingan penyelesaian tugas akhir saya (Skripsi), karena itu jawaban yang Bapak, Ibu, Saudara/I sangat diharapkan dalam penelitian ini.
3. Isilah kuisioner berikut ini dengan memberikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang bapak/ibu anggap paling tepat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Identitas Responden (asli)

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Luas area lahan :
Lama Usaha :

Pertanyaan :

1. Bagaimana usaha yang Bapak/Ibu jalankan sebelum memperoleh fasilitas kredit yang diberikan oleh pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) yang disalurkan melalui Gapoktan Bumi Kencono?
 - a. Sulit meningkatkan usaha
 - b. Kurangnya modal
 - c. Usaha tidak berkembang
2. Apa tujuan Bapak/Ibu memperoleh fasilitas kredit dari PUAP?
 - a. Untuk memperbesar hasil usaha
 - b. Untuk modal usaha
 - c. Untuk konsumsi
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai waktu pencairan dana kredit/pinjaman yang dilakukan oleh pengurus Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)?
 - a. Cepat

- b. Lama
 - c. Sangat lama
4. Bagaimana hasil usaha yang Bapak/Ibu jalankan setelah memperoleh pinjaman dari PUAP?
 - a. Meningkatkan
 - b. Biasa saja
 - c. Menurun
 5. Berapa keuntungan yang Bapak/Ibu peroleh setelah mendapat pinjaman dari PUAP?
 - a. kurang dari Rp. 500.000
 - b. Rp. 500.000 – Rp. 1000.000
 - c. Rp. 1000.000 - Rp. 5000.000
 6. Apakah usaha yang saudara jalankan mendapat pengawasan dari pihak Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Desa Sritejokencono setelah mendapatkan bantuan modal?
 - a. Sesekali
 - b. Sering sekali
 - c. Tidak pernah
 7. Apakah Bapak/ Ibu merasa cukup dengan besar pinjaman yang diberikan PUAP?
 - a. Sudah cukup
 - b. Kurang cukup
 - c. Memuaskan
 8. Apa yang menjadi kendala Bapak / Ibu tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo?
 - a. Mengalami gagal panen
 - b. Adanya keluarga yang sakit
 - c. Mengalami musibah bencana alam
 9. Apakah pihak pengelola PUAP pernah melakukan pemaksaan kepada Bapak/ Ibu terhadap pembayaran kredit?
 - a. pernah
 - b. tidak pernah
 - c. tidak memberikan jawaban
 10. Solusi apakah yang ditawarkan oleh pihak pengelola PUAP pada petani yang mengalami tunggakan?
 - a. melakukan pengawasan
 - b. memberikan surat peringatan
 - c. menambah jangka waktu pembayaran



Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan TA 2015

**DIREKTORAT JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06/Permentan/OT.140/2/2015

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2014 ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2014;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani dalam mengelola dan mengembangkan usaha kegiatannya secara mandiri dan berkelanjutan di bidang pertanian melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk melanjutkan pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2015, perlu menetapkan Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
18. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
19. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 124/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 125/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 135/Permentan/OT.140/12/2014;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 126/Permentan/OT.140/11/2014 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 136/Permentan/OT.140/12/2014;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015;
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 85/Kpts/OT.160/2/2015 tentang Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun Anggaran 2015 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Pasal 3

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SULAIMAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait di lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia ;
10. Bupati/ Walikota yang bersangkutan;
11. Kepala Dinas Lingkup Pertanian Provinsi;
12. Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 06/Permentan/OT.140/2/2015
TANGGAL: 18 Februari 2015

PEDOMAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN
TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Indonesia pada bulan Maret 2014 tercatat sebesar 28,28 juta jiwa (11,25 persen) dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan September 2013 sebesar 28,55 juta orang (11,47 persen). Selama periode bulan September 2013 sampai dengan bulan Maret 2014, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 0,13 juta orang (dari 10,63 juta orang pada bulan September 2013 menjadi 10,50 juta orang pada bulan Maret 2014), sementara di daerah perdesaan berkurang 0,15 juta orang (dari 17,92 juta orang pada September 2013 menjadi 17,77 juta orang pada Maret 2014).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada bulan September 2013 sebesar 8,34 persen, menurun menjadi 8,52 persen pada bulan Maret 2014. Begitu juga dengan penduduk miskin di daerah perdesaan, yaitu dari 14,42 persen pada bulan September 2013 menjadi 14,17 persen pada bulan Maret 2014. Namun kemiskinan di perdesaan akan terus menjadi masalah pokok nasional sehingga penanggulangan kemiskinan tetap menjadi program prioritas untuk tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi serta organisasi tani yang masih lemah. Oleh karena itu program penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan global untuk mencapai Tujuan Millenium. Kementerian Pertanian mulai tahun 2008-2014 telah melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di bawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat.

Untuk koordinasi pelaksanaan PUAP di Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian membentuk Tim PUAP Pusat untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP Nasional. PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Gapoktan merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, Gapoktan didampingi oleh Tenaga Pendamping PUAP (Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani).

Untuk mencapai tujuan PUAP, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, PUAP difokuskan untuk mempercepat pengembangan usaha ekonomi produktif yang diusahakan petani di perdesaan. PUAP dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Eselon I terkait lingkup Kementerian Pertanian.

B. Tujuan

PUAP bertujuan untuk:

1. mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah;
2. meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani (PMT);
3. memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis; dan
4. meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.

C. Sasaran

Sasaran PUAP yaitu sebagai berikut:

1. berkembangnya usaha agribisnis di desa terutama desa miskin sesuai dengan potensi pertanian desa;
2. berkembangnya Gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani untuk menjadi kelembagaan ekonomi;
3. meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan/atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan
4. berkembangnya usaha agribisnis petani yang mempunyai siklus usaha.

D. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan *output* antara lain:

1. tersalurkannya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP 2015 kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin anggota Gapoktan sebagai modal untuk melakukan usaha produktif pertanian; dan
2. terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola Gapoktan, Penyuluh dan PMT.

Indikator keberhasilan *outcome* antara lain:

1. meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik petani pemilik penggarap, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani;
2. meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha; dan
3. meningkatnya aktivitas kegiatan usaha agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan.

Sedangkan Indikator *benefit* dan *Impact* antara lain:

1. berkembangnya usaha agribisnis di perdesaan;
2. berfungsinya Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani di perdesaan yang dimiliki dan dikelola oleh petani; dan
3. berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan meliputi: Pola Dasar dan Strategi Pelaksanaan PUAP; Organisasi Pelaksanaan PUAP; Seleksi Desa dan Gapoktan Penerima PUAP; Tata Cara dan Prosedur Penyaluran Dana BLM PUAP 2015; Pembinaan dan Pengendalian; Pengawasan; Evaluasi dan Pelaporan; dan Penutup.

F. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yang selanjutnya disingkat PUAP adalah bantuan modal usaha Gabungan Kelompok tani dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran.
2. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
3. Kelompok tani yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
4. Gabungan Kelompok tani PUAP yang selanjutnya disingkat Gapoktan PUAP adalah kumpulan beberapa Poktan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha yang menerima dana BLM PUAP.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (termasuk di dalamnya Kampung (Papua dan Papua Barat), Kelurahan dan Nagari).
6. Perdesaan adalah kawasan yang secara komparatif memiliki keunggulan sumber daya alam dan kearifan lokal (*endogeneous knowledge*) khususnya pertanian dan keanekaragaman hayati.
7. Pemberdayaan Masyarakat Pertanian adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat agribisnis sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan usahanya secara berkelanjutan.
8. Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas 4 (empat) subsistem meliputi subsistem hulu, subsistem pertanian primer, subsistem agribisnis hilir, dan subsistem penunjang.
9. Subsistem Hulu adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian.

10. Subsistem Pertanian Primer adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu.
11. Subsistem Agribisnis Hilir adalah yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian.
12. Subsistem Penunjang adalah kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-lain.
13. Usaha Produktif adalah segala jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani/Gabungan Kelompok tani di perdesaan dalam bidang agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha harian, mingguan, bulanan, musiman maupun tahunan.
14. Bantuan Langsung Masyarakat PUAP yang selanjutnya disingkat BLM PUAP adalah dana bantuan modal untuk Gapoktan guna pengembangan usaha agribisnis di perdesaan.
15. Rencana Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat RUB adalah rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa.
16. Dana Pendukung adalah dana yang dialokasikan oleh Bupati/Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk persiapan, pengawalan dan pembinaan Gapoktan PUAP.
17. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh dan PMT dalam rangka pemberdayaan petani, Poktan dan Gapoktan dalam melaksanakan PUAP.
18. Penyuluh adalah penyuluh pertanian yang ditugaskan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mendampingi petani, Poktan dan Gapoktan dalam pelaksanaan PUAP.
19. Penyelia Mitra Tani yang selanjutnya disingkat PMT adalah individu yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang keuangan mikro yang direkrut oleh Kementerian Pertanian untuk melakukan sosialisasi, advokasi, dan supervisi tentang pengetahuan PUAP kepada pengurus Gapoktan dalam pengelolaan dana BLM PUAP.
20. Komite Pengarah adalah komite yang dibentuk oleh pemerintahan desa yang terdiri dari wakil tokoh masyarakat, wakil dari Poktan dan Penyuluh.
21. Balai Penyuluhan Pertanian/Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BPP/BP3K adalah lembaga yang menangani penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan.
22. Daftar Nominasi Sementara selanjutnya disingkat DNS adalah daftar Gapoktan calon penerima BLM-PUAP yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang akan diverifikasi di lapangan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian.
23. Lembaga Ekonomi Petani atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis yang selanjutnya disingkat LKM-A adalah salah satu unit usaha otonom yang didirikan dan dimiliki oleh Gapoktan penerima dana BLM PUAP guna memecahkan masalah/kendala akses permodalan anggota Gapoktan PUAP.

BAB II

POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN PUAP

A. Pola Dasar

Pola dasar PUAP dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM PUAP 2015 kepada Gapoktan dalam mengembangkan Usaha Produktif petani untuk mendukung swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Untuk pencapaian tujuan tersebut di atas, komponen utama dari pola dasar pengembangan PUAP, yaitu:

- 1) Keberadaan Gapoktan;
- 2) Keberadaan Penyuluh dan PMT sebagai pendamping;
- 3) Penyaluran dana BLM kepada petani pemilik penggarap, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani; dan
- 4) Pembekalan pengetahuan tentang PUAP bagi pengurus Gapoktan dan lain-lain.

B. Strategi Dasar

Strategi Dasar PUAP meliputi:

1. Optimalisasi potensi agribisnis di perdesaan;
2. Fasilitasi modal usaha bagi petani pemilik penggarap, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani miskin;
3. Penguatan kelembagaan Gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dikelola dan dimiliki oleh petani; dan
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP.

C. Strategi Operasional

Strategi Operasional PUAP sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP dilaksanakan melalui:
 - a) pembekalan pengetahuan bagi petugas tim teknis kecamatan, kabupaten/kota sebagai pendamping dan pembina PUAP;
 - b) rekrutmen PMT;
 - c) pembekalan pengetahuan tentang PUAP bagi pengurus Gapoktan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, sebelum dana BLM PUAP dicairkan; dan
 - d) pendampingan bagi petani oleh penyuluh dan PMT bagi pengurus Gapoktan.
2. Optimalisasi potensi agribisnis di perdesaan dilaksanakan melalui:
 - a) identifikasi potensi Desa;
 - b) penentuan usaha agribisnis (hulu, budidaya dan hilir); dan
 - c) penyusunan dan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis.

3. Fasilitasi modal usaha bagi petani pemilik penggarap, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani miskin dilaksanakan melalui:
 - a) penyaluran dana BLM PUAP 2015 kepada pelaku agribisnis melalui Gapoktan;
 - b) pembinaan teknis usaha agribisnis dan alih teknologi; dan
 - c) fasilitasi pengembangan kemitraan dengan sumber permodalan lainnya.
4. Penguatan kelembagaan Gapoktan dilaksanakan melalui:
 - a) pendampingan Gapoktan oleh Penyuluh dan PMT di setiap Kabupaten/Kota; dan
 - b) peningkatan kapasitas Gapoktan membentuk lembaga ekonomi petani di perdesaan.

D. Pelaksanaan Kegiatan PUAP

Pelaksanaan kegiatan PUAP meliputi:

1. Identifikasi dan verifikasi usulan Desa calon lokasi serta Gapoktan calon penerima dana BLM PUAP 2015;
2. Verifikasi, pemberkasan, dan penetapan Desa/Gapoktan penerima dana BLM PUAP 2015;
3. Pelatihan bagi fasilitator (Penyuluh dan PMT) serta pembekalan pengetahuan tentang PUAP bagi pengurus Gapoktan;
4. Rekrutmen dan pelatihan bagi PMT;
5. Sosialisasi dan koordinasi kegiatan PUAP;
6. Pendampingan;
7. Penyaluran BLM PUAP 2015;
8. Pembinaan dan Pengendalian;
9. Pengawasan; dan
10. Evaluasi dan pelaporan.

BAB III

ORGANISASI PELAKSANAAN PUAP

A. Tingkat Pusat

1. Tim PUAP Pusat

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi, Menteri Pertanian membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana PUAP. Tim Pengarah PUAP diketuai oleh Menteri Pertanian dengan anggota Eselon I lingkup Kementerian Pertanian terkait PUAP. Tugas utama dari Tim Pengarah adalah merumuskan kebijakan umum dalam pengembangan PUAP, baik dengan instansi Pusat maupun dengan instansi daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota).

Tim Pelaksana tingkat pusat diketuai oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dibantu oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian selaku Wakil Ketua, serta Direktur Pembiayaan Pertanian selaku Sekretaris.

Anggota Tim Pelaksana PUAP Pusat terdiri dari Pejabat Eselon II lingkup Kementerian Pertanian terkait PUAP. Tugas Utama Tim Pelaksana PUAP adalah melaksanakan seluruh kegiatan PUAP mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Tim Pelaksana tingkat Pusat menetapkan Petunjuk Teknis Pendamping PUAP.

2. Sekretariat Tim PUAP Pusat

Sekretariat PUAP Pusat mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP di tingkat pusat, sebagai berikut:

- a) Sekretariat PUAP Pusat secara *ex Officio* berkedudukan di Kantor Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- b) Direktur Pembiayaan Pertanian selaku Sekretaris Tim Pelaksana PUAP Pusat.

B. Tingkat Provinsi

1. Tim Pembina

Gubernur membentuk Tim Pembina PUAP tingkat provinsi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi pertanian tanaman pangan untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat provinsi. Tim Pembina PUAP Provinsi diketuai oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi pertanian tanaman pangan dengan Sekretaris Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), sedangkan anggota berasal dari instansi terkait lainnya.

Tim Pembina PUAP Provinsi mempunyai tugas:

- a) menetapkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) sebagai penjabaran dari Pedoman PUAP;
- b) melaksanakan verifikasi atas dokumen administrasi Gapoktan PUAP yang berasal dari Tim Teknis Kabupaten/Kota;
- c) melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan PUAP dengan kabupaten/kota; dan
- d) mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP di tingkat provinsi.

2. Sekretariat PUAP Provinsi

Tim Pembina PUAP Provinsi dapat membentuk Sekretariat PUAP dengan kedudukan dan tugas sebagai berikut:

- a) Sekretariat PUAP berkedudukan di kantor Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) atau Kantor Ketua Tim Pembina PUAP Provinsi;
- b) Susunan organisasi Sekretariat PUAP Provinsi terdiri dari:
 - i. Kepala Sekretariat;
 - ii. Wakil Kepala Sekretariat;
 - iii. Kelompok Kerja;
- c) Struktur organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat ditetapkan oleh Ketua Tim Pembina PUAP Provinsi; dan
- d) Tugas utama dari Sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi yaitu mengkoordinasikan dan verifikasi dokumen Gapoktan calon penerima dana BLM PUAP 2015 dari kabupaten/kota serta membantu pelaksanaan pelaporan yang disusun oleh PMT.

C. Tingkat Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota membentuk Tim Teknis PUAP tingkat kabupaten/kota, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi Pertanian Tanaman Pangan. Tim Teknis dipimpin oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi pertanian tanaman pangan dan Sekretaris Tim Teknis oleh lembaga yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten/kota. Susunan organisasi Tim Teknis Kabupaten/Kota terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota. Salah satu anggota Tim Teknis adalah Penyelia Mitra Tani (PMT).

Tim Teknis Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

1. menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengembangan PUAP sebagai penjabaran dari Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang ditetapkan oleh provinsi;
2. mengkoordinasikan usulan Desa, Gapoktan dan pengurus calon penerima dana BLM PUAP 2015 dari desa;
3. melakukan sosialisasi dan pembekalan pengetahuan tentang PUAP kepada calon Gapoktan penerima dana BLM PUAP bersama PMT;
4. melakukan verifikasi dokumen kelengkapan administrasi calon penerima dana BLM PUAP 2015 ;
5. melakukan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PUAP berkoordinasi dengan PMT dan penyuluh;
6. mengesahkan dan menyetujui RUB yang diusulkan Gapoktan serta kelengkapan dokumen administrasi lainnya; dan
7. mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP di tingkat kabupaten/kota.

D. Tingkat Kecamatan

Camat membentuk Tim Teknis PUAP tingkat kecamatan. Tim Teknis PUAP tingkat kecamatan diketuai Camat dibantu oleh Kepala BPP/BP3K sebagai sekretaris, Kepala Cabang Dinas Pertanian (KCD) dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan lokasi PUAP sebagai anggota.

Tim Teknis Kecamatan mempunyai tugas:

1. melaksanakan identifikasi dan verifikasi Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima dana BLM PUAP 2015; dan
2. melakukan pembinaan dan pengawasan PUAP di tingkat kecamatan.

E. Tingkat Desa

Pelaksana PUAP di tingkat desa yaitu pengurus Gapoktan didampingi oleh Penyuluh dan PMT.

Kepala Desa dapat mengusulkan Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima BLM PUAP 2015 melalui Kepala BPP/BP3K, yang selanjutnya mengusulkan kepada Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota serta melakukan pembinaan dan pengawasan Gapoktan PUAP.

Kepala Desa/Kepala Kelurahan dapat membentuk Komite Pengarah yang terdiri atas wakil tokoh masyarakat, wakil Poktan dan Penyuluh.

F. Penyuluh

Penyuluh mempunyai tugas :

1. melakukan identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian;
2. memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis perdesaan termasuk pemasaran hasil usaha;
3. membantu memecahkan permasalahan usaha petani/poktan, serta mendampingi Gapokan selama penyusunan dokumen PUAP dan proses penumbuhan kelembagaan;
4. melaksanakan pendampingan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa;
5. membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi, teknologi dan pasar;
6. memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana BLM PUAP 2015 bersama dengan PMT; dan
7. membantu Gapoktan dalam membuat laporan perkembangan pelaksanaan PUAP.

G. Penyelia Mitra Tani (PMT)

PMT mempunyai tugas:

1. melaksanakan pertemuan reguler dengan Penyuluh dan Gapoktan;
2. melakukan verifikasi awal terhadap RUB dan dokumen administrasi lainnya;
3. melaksanakan pengawalan pemanfaatan dana BLM PUAP 2015 yang dikelola oleh Gapoktan;
4. bersama dengan Penyuluh melakukan pendampingan kepada Gapoktan;
5. bersama dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota lainnya melaksanakan evaluasi pelaksanaan PUAP tahun sebelumnya dan membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan PUAP kepada Tim PUAP Pusat melalui Tim Pembina PUAP Provinsi c.q Sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi; dan
6. melaksanakan fungsi pendampingan bagi Gapoktan PUAP yang telah berhasil meningkatkan kinerja usaha dan jumlah dana keswadayaan sehingga tumbuh menjadi lembaga ekonomi petani atau Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).

BAB IV

SELEKSI DESA DAN GAPOKTAN PENERIMA PUAP

A. Kriteria dan Penentuan Desa Calon Lokasi PUAP

Kriteria desa calon lokasi PUAP:

1. desa berbasis pertanian;
2. memiliki Gapoktan yang sudah aktif; dan
3. desa belum pernah memperoleh dana BLM PUAP.

Jumlah desa calon lokasi PUAP per kabupaten/kota, ditentukan oleh Tim PUAP Pusat dengan mempertimbangkan:

1. jumlah desa yang belum mendapatkan PUAP;
2. jumlah alokasi desa PUAP yang telah direalisasikan sebelumnya;
3. alokasi dana pendukung untuk pembinaan yang disediakan oleh kabupaten/kota; dan
4. potensi integrasi lokasi desa dengan program/kegiatan lainnya.

B. Kriteria dan Penentuan Gapoktan Calon Penerima dana BLM PUAP 2015

Gapoktan calon penerima dana BLM PUAP 2015 harus berada pada desa calon lokasi PUAP yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola usaha agribisnis;
2. mempunyai kepengurusan yang aktif dan dikelola oleh petani; dan
3. pengurus Gapoktan adalah petani, bukan Kepala Desa/Lurah atau Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah.

Gapoktan yang akan diusulkan sebagai calon penerima dana BLM PUAP 2015 diketahui oleh Kepala Desa dan Kepala BPP/BP3K. Pada setiap desa calon lokasi PUAP, akan ditetapkan 1 (satu) Gapoktan penerima dana BLM PUAP 2015.

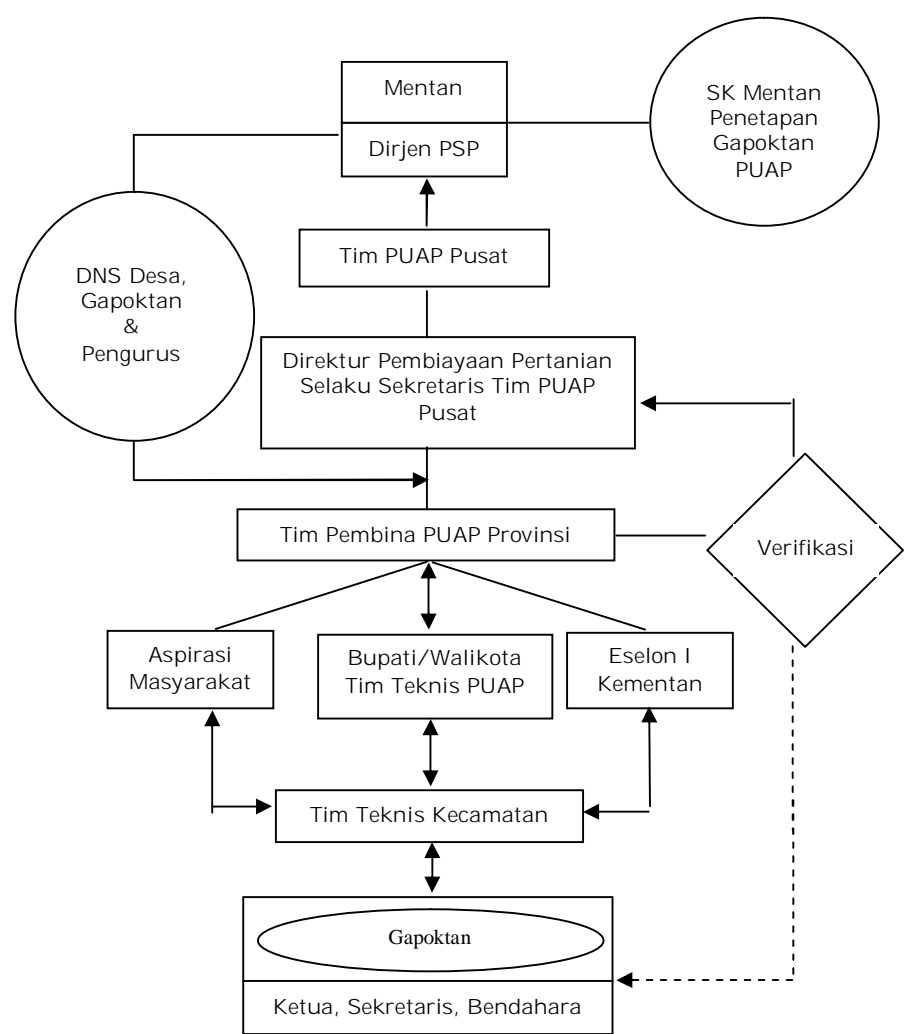
C. Tahapan Pengusulan Desa, Gapoktan dan Pengurus Calon Penerima Dana BLM PUAP 2015

1. Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima BLM PUAP 2015 dapat diusulkan melalui:
 - a. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk ;
 - b. Aspirasi masyarakat; dan
 - c. Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian.
2. Tim Teknis Kecamatan melakukan identifikasi dan verifikasi Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima BLM PUAP 2015 mengacu kepada kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf B;
3. Hasil identifikasi dan verifikasi Desa, Gapoktan dan Pengurus oleh Tim Teknis Kecamatan selanjutnya diusulkan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota, kemudian diteruskan kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, untuk diusulkan kepada Tim PUAP Pusat; dan
4. Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima BLM PUAP 2015 yang disampaikan melalui aspirasi masyarakat dan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian diusulkan langsung kepada Tim PUAP Pusat.

D. Penetapan Desa, Gapoktan dan Pengurus Penerima Dana BLM PUAP 2015

1. Tim PUAP Pusat melakukan sinkronisasi terhadap usulan PUAP 2015 dari Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk, aspirasi masyarakat dan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
2. Tim PUAP Pusat melakukan verifikasi terhadap usulan Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima dana BLM PUAP 2015 menjadi DNS PUAP 2015.

3. DNS Desa, Gapoktan dan Pengurus calon penerima dana BLM PUAP 2015 tersebut oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian disampaikan kepada Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota melalui Tim Pembina PUAP Provinsi untuk diverifikasi yang meliputi Desa, Gapoktan dan Pengurus (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) Gapoktan.
4. Tim Teknis Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi DNS berikut kelengkapan dokumen bagi Gapoktan yang telah memenuhi persyaratan kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui Tim Pembina PUAP Provinsi c.q Sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi.
5. Berdasarkan hasil verifikasi Tim PUAP Pusat, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atas nama Menteri Pertanian menetapkan Gapoktan Penerima dana BLM PUAP Tahun 2015 dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Pertanian.



Gambar 1. Alur Usulan dan Penetapan Desa, Gapoktan dan Pengurus.

BAB V

TATA CARA DAN PROSEDUR PENYALURAN DANA BLM PUAP 2015

A. Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB)

1. RUB disusun oleh Gapoktan berdasarkan hasil identifikasi usaha agribisnis di desa calon penerima dana BLM PUAP yang dibantu oleh Penyuluh.

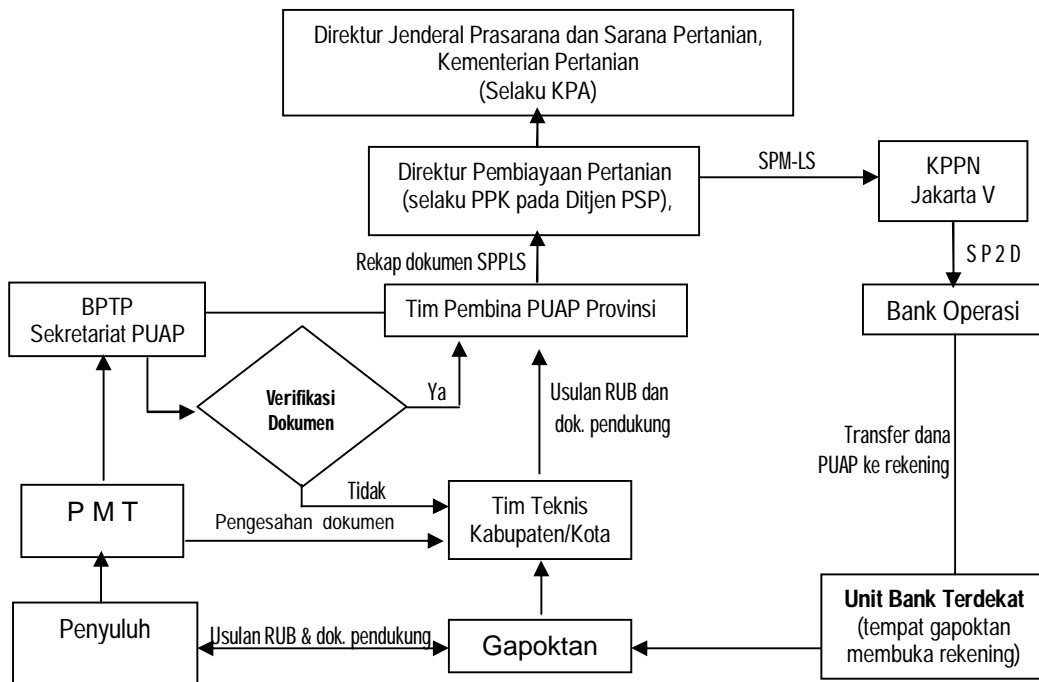
2. Penyusunan RUB, harus memperhatikan kelayakan usaha produktif petani, yaitu: a) budidaya di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan; dan b) usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan dan usaha lain berbasis pertanian;
3. RUB disusun oleh Gapoktan dibantu oleh Penyuluh. Selanjutnya RUB diverifikasi oleh PMT untuk disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota; dan
4. RUB yang sudah disetujui, selanjutnya disampaikan kepada Tim Pembina PUAP Provinsi c.q Sekretariat PUAP Provinsi bersama dengan dokumen administrasi pendukung antara lain: a) Perjanjian Kerjasama; b) Pakta Integritas; c) Berita Acara Serah Terima Uang; d) Surat Perintah Kerja (SPK); e) Nomor Rekening Bank Gapoktan yang masih aktif; f) Kwitansi/Bukti Pembayaran bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan; g) Data Dasar Gapoktan; h) Data Dasar PMT; i) Data Dasar Penyuluh; j) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan tentang Pemanfaatan Dana BLM PUAP Tahun 2015 bermaterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh Ketua Gapoktan.

B. Verifikasi Dokumen Gapoktan PUAP

1. Tim Pembina PUAP Provinsi c.q Sekretariat PUAP Provinsi meneliti dan memverifikasi dokumen RUB dan dokumen administrasi pendukung lainnya, yang diusulkan oleh Gapoktan yang telah direkomendasi oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota;
2. RUB dan dokumen administrasi pendukung yang tidak memenuhi syarat, dikembalikan oleh Tim Pembina PUAP Provinsi c.q Sekretariat PUAP kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk diperbaiki dan dilengkapi; dan
3. RUB dan dokumen administrasi pendukung lainnya yang sudah dinyatakan memenuhi syarat selanjutnya dibuat rekapitulasi dokumen kemudian disampaikan kepada Sekretaris Tim PUAP Pusat cq Direktur Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, melalui Tim Pembina PUAP Provinsi c.q Sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi.

C. Prosedur Penyaluran dana BLM PUAP 2015

1. Direktur Pembiayaan Pertanian selaku PPK pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, melakukan proses penyaluran dana BLM PUAP Tahun 2015 kepada Gapoktan, sesuai dengan persyaratan dan kelengkapan dokumen Gapoktan yang telah ditetapkan;
2. Penyaluran dana BLM PUAP 2015 dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke rekening Gapoktan;
3. Surat Perintah Membayar (SPM-LS) diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta V dengan lampiran Gapoktan Calon Penerima dana BLM PUAP 2015 yang ditandatangani oleh pejabat penerbit SPM; dan
4. Penyaluran dana BLM PUAP 2015 dari KPPN Jakarta V ke rekening Gapoktan melalui mekanisme SPM-LS penerbitan SP2D diatur lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.



Gambar 2. Mekanisme Penyampaian Dokumen dan Penyaluran Dana BLM PUAP 2015

D. Prosedur Pencairan Dana BLM PUAP 2015

Pencairan dana BLM PUAP Tahun Anggaran 2015, mengacu kepada Pedoman Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2015 Nomor 137/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2015.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

A. Pembinaan

1. Tingkat Pusat

Untuk menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan PUAP, Tim PUAP Pusat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan PUAP.

Pembinaan Teknis usaha produktif dilakukan oleh Unit Eselon I terkait lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya, antara lain:

- Pembinaan Teknis usaha produktif tanaman pangan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- Pembinaan Teknis usaha produktif hortikultura dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura;
- Pembinaan Teknis usaha produktif peternakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Pembinaan Teknis usaha produktif perkebunan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan;

- e) Pembinaan Teknis usaha produktif pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- f) Pembinaan inovasi teknologi dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; dan
- g) Pembinaan Teknis Kelembagaan Gapoktan dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Dalam melakukan pembinaan teknis usaha produktif kepada usaha ekonomi yang dijalankan Gapoktan, Unit Eselon I terkait lingkup Kementerian Pertanian mengacu pada petunjuk teknis pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengalokasikan anggaran pembinaan.

2. Tingkat Provinsi

Tim Pembina PUAP Provinsi kepada Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota difokuskan kepada: a) peningkatan kualitas SDM yang menangani dana BLM PUAP 2015 di tingkat kabupaten/kota; dan b) Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan; dan c) mengembangkan sistem pelaporan PUAP.

Pembinaan Teknis pada tingkat provinsi dilakukan oleh Unit Kerja lingkup pertanian sesuai dengan bidang tugasnya, antara lain :

- a) Pembinaan Teknis usaha produktif dilakukan oleh dinas lingkup pertanian;
- b) Pendampingan teknis teknologi inovasi usaha ekonomi produktif pertanian dilakukan oleh BPTP;
- c) Pembinaan Teknis Kelembagaan Gapoktan dan Unit usaha Otonom dilakukan oleh Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian.

Untuk efektifitas pembinaan teknis pada gapoktan PUAP, maka dinas teknis lingkup pertanian, harus dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Pembinaan Teknis pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh unit kerja lingkup pertanian sesuai dengan bidang tugasnya, antara lain:

- a) Pembinaan Teknis usaha produktif dilakukan oleh dinas lingkup pertanian;
- b) Pendampingan inovasi teknologi usaha ekonomi produktif pertanian dilakukan oleh BPTP; dan
- c) Pembinaan Teknis Kelembagaan Gapoktan dan Unit usaha Otonom dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Lembaga yang menangani Penyuluhan Pertanian.

Pembinaan pelaksanaan PUAP oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota maupun Tim Teknis Kecamatan kepada Gapoktan PUAP dilakukan dalam bentuk kunjungan, rapat, pendampingan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap pola pelaksanaan PUAP.

B. Pengendalian

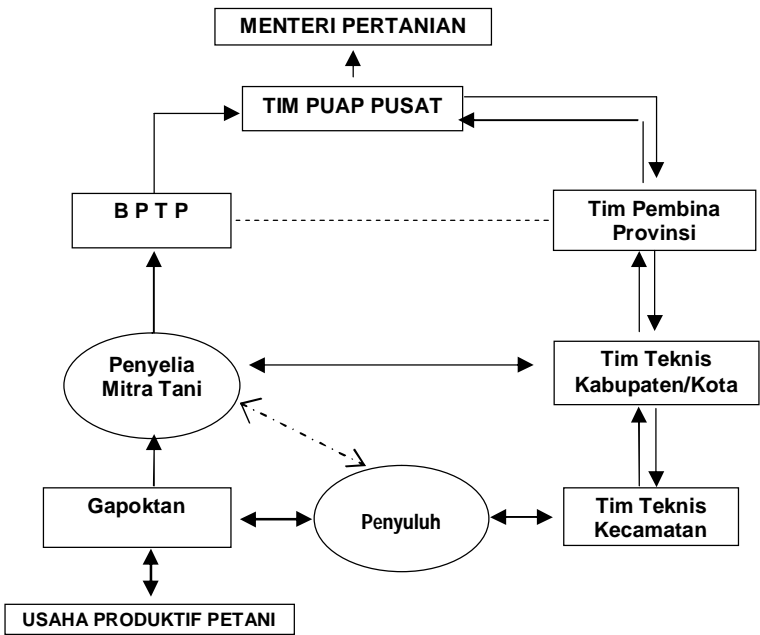
1. Tingkat Pusat

Pelaksanaan pengendalian PUAP dilakukan dengan memfungsikan sekretariat Tim PUAP Pusat untuk menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat kepada pihak yang berwenang. Tim Pembina PUAP Provinsi dan Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota agar dapat memfungsikan anggota tim untuk melakukan fungsi pengendalian.

Pengendalian terhadap PUAP dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan PUAP yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Tim PUAP Pusat melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan lapangan ke provinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan umum Menteri Pertanian dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Untuk mengendalikan pelaksanaan PUAP, Kementerian Pertanian mengembangkan *operation room* sebagai Pusat Pengendali PUAP berbasis elektronik yang dikelola oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin). Pusdatin sebagai pengelola *operation room* bertanggung jawab mengembangkan dan mengelola *data base* PUAP yang mencakup: *data base* Gapoktan, Penyuluh, Penyelia Mitra Tani (PMT) dan usaha agribisnis Gapoktan. Selain itu, Pusdatin mempersiapkan data dan mengelola laporan perkembangan pelaksanaan PUAP. Secara rinci alur pembinaan dan pengendalian PUAP dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Alur Pembinaan dan Pengendalian

2. Tingkat Provinsi

Untuk mengendalikan Pelaksanaan pengendalian PUAP di tingkat provinsi, Gubernur diharapkan dapat membentuk *operation room* sekretariat yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP).

Tim Pembina PUAP Provinsi melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dilaksanakan oleh Sekretariat PUAP Provinsi (BPTP) dengan PMT dan penyuluh setiap bulan, dan kunjungan ke kabupaten/kota dan kecamatan untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan tujuan dan sasaran serta menyelesaikan permasalahan PUAP.

3. Tingkat Kabupaten

Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan ke kecamatan dan desa untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk serta menyelesaikan permasalahan PUAP.

Pengendalian PUAP di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk diharapkan dapat membentuk *operation room* sekretariat yang dikelola oleh Sekretariat Sekretaris PUAP Kabupaten/Kota. Tim Teknis Kabupaten/Kota menugaskan PMT untuk membuat laporan pelaksanaan PUAP.

Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan ke kecamatan dan desa agar sesuai dengan tujuan dan sasaran serta menyelesaikan permasalahan PUAP.

Tim Teknis PUAP Kecamatan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan reguler dan kunjungan ke desa dan Gapoktan sesuai dengan kebijakan teknis Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Kepala desa/lurah melalui Komite Pengarah yang terdiri dari wakil tokoh masyarakat, wakil Poktan dan Penyuluh melakukan pengendalian terhadap penggunaan dan perguliran dana BLM PUAP 2015 pada Gapoktan.

BAB VII

PENGAWASAN

A. Pengawasan Program

Dalam sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pengawas. Untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari suatu program dan kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam pelaksanaan kegiatan PUAP perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Internal meliputi seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan PUAP telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan Pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, pemantauan/pengawasan dan evaluasi kegiatan strategis terhadap pelaksanaan PUAP. Dari hasil pengawasan diharapkan dapat diketahui tingkat keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja PUAP, identifikasi berbagai kelemahan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PUAP sejak dari tahap persiapan, penentuan Desa/Gapoktan, penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP 2015, pengusutan terhadap penyimpangan penggunaan dana BLM PUAP 2015 dan memberikan saran-saran perbaikan sebagai umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan PUAP dan sebagai *feed forward* terhadap aspek perencanaan serta pengambilan kebijakan PUAP yang akan datang.

B. Pengawasan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana BLM PUAP

Dana BLM PUAP 2015 yang disalurkan Kementerian Pertanian kepada Gapoktan sebagai modal usaha diharapkan dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan oleh pengurus Gapoktan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB).

Kepala Desa/Lurah dan Kepala BPP/BP3K bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana BLM PUAP 2015 untuk pengembangan usaha produktif.

Gapoktan PUAP bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan dana BLM PUAP yang dinyatakan melalui Surat Pernyataan Tanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan PUAP yang diberi materai Rp. 6.000,-.

Setelah pencairan dana BLM PUAP oleh Gapoktan, maka setiap orang dan/atau pihak yang menyalahgunakan dana BLM PUAP 2015 wajib mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tindak lanjut permasalahan penyalahgunaan dana BLM PUAP 2015 dilakukan oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyelesaian Permasalahan (BAP).

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan PUAP dilaksanakan oleh Tim Monev dengan melakukan evaluasi perkembangan dana BLM PUAP, jenis usaha agribisnis yang dilaksanakan Gapoktan dan kegiatan pendampingan oleh PMT. Tim Monev PUAP dapat dibentuk oleh Tim PUAP Pusat.

Evaluasi pelaksanaan PUAP di tingkat provinsi dilakukan oleh Tim Pembina Provinsi dengan melakukan evaluasi perkembangan dana BLM PUAP, jenis usaha agribisnis yang dilaksanakan Gapoktan dan kegiatan pendampingan oleh PMT dari tingkat Kabupaten/Kota. Apabila diperlukan Tim Monev PUAP dapat dibentuk oleh Tim Pembina PUAP Provinsi.

Evaluasi pelaksanaan PUAP di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota dengan melakukan evaluasi perkembangan dana BLM PUAP, jenis usaha agribisnis yang dilaksanakan Gapoktan dan kegiatan pendampingan oleh PMT dari tingkat Kecamatan. Apabila diperlukan Tim Monev PUAP dapat dibentuk oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota.

B. Pelaporan

Sesuai dengan alur pembinaan dan pengendalian PUAP, maka terdapat laporan yang harus disampaikan oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota dan laporan Tim Pembina PUAP Provinsi kepada Tim PUAP Pusat.

Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota dan Tim Pembina PUAP Provinsi membuat laporan pelaksanaan kegiatan PUAP dibantu oleh PMT untuk disampaikan pada akhir tahun kepada Tim PUAP Pusat.

BAB IX PENUTUP

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program strategis Kementerian Pertanian untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan. Dalam rangka mempercepat keberhasilan PUAP dilakukan berbagai upaya dan strategi pelaksanaan yang terpadu melalui: pengembangan kegiatan ekonomi rakyat yang diprioritaskan pada penduduk miskin perdesaan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia; penguatan modal bagi petani, buruh tani dan rumah tangga tani; dan penguasaan teknologi produksi, pemasaran hasil dan pengelolaan nilai tambah.

Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, PUAP telah dilaksanakan di 49.186 Desa/Gapoktan sebagai pusat pertumbuhan usaha agribisnis di perdesaan dan diharapkan melalui Gapoktan PUAP dapat menumbuhkan tingkat keswadayaan masyarakat petani.

Keberhasilan PUAP sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan anggaran dari tingkat pusat sampai daerah. Diharapkan dengan adanya Pendampingan oleh Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani serta adanya pengawalan dan pembinaan dari provinsi dan kabupaten/kota dapat mendorong tumbuhnya Gapoktan menjadi kelembagaan ekonomi petani di perdesaan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

BLANKO KONSULTASI

Nama : Lia Ariyanti

NPM : 1451010068

Pembimbing I : Drs. Nasruddin, M.Ag.

Pembimbing II : A. Zuliansyah, S.Si., MM.

Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Petani Sawah Gapoktan Bumi Kencono Desa Sritejokencono Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)

No	Tanggal	Permasalahan	Saran Pembimbing	Paraf	
				Pembimbing I	Pembimbing II
1	30-04- 2017	BAB I	1) Perbaikan Judul 2) Perbaikan latar belakang masalah 3) Perbaikan Rumusan Masalah	
2	04-05-2017	BAB I - BAB III	1) Penambahan teori pada BAB II 2) Perbaikan pada BAB III tentang lokasi penelitian 3) Perbaikan kuesioner penelitian	

3	25-05-2018	BAB I – BAB II	1) Acc kuesioner 2) Acc BAB I – III lanjut ke pembimbing 1	
4	28-05-2018	BAB I – BAB III	1) Perbaiki rumusan masalah 2) Perbaiki sistematika penulisan	
	04-06-2018	BAB I – BAB III	1) Acc kuesioner 2) Acc BAB I – BAB III lanjut sampai bab V	
	06-09-2017	BAB I – BAB V	1) Perbaiki abstrak 2) Perbaiki analisis data dan pembahasan 3) Penambahan analisis Islam pada BAB IV	
	14-09-2018	BAB I – BAB V	1) Acc BAB I – BAB V lanjut ke pembimbing 1	

	17-09-2018	BAB I – BAB V	1) Perbaikan daftar isi 2) Penambahan analisis Islam 3) Perbaikan penulisan sesuai pedoman	
	19-09-2018	BAB I – BAB V	1) Acc BAB I – BAB V	
			Daftar Munaqasah	
			Daftar Munaqasah	

Bandar Lampung, Oktober 2018

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Nasruddin, M.Ag.
NIP. 195809241990031003

A. Zuliansyah, S.Si., MM.
NIP. 198302222009121003

Wawancara



Kegiatan Gapoktan

